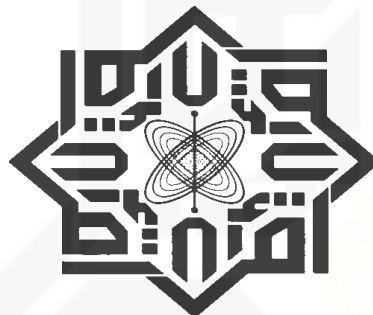




IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARÎ'AH*

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Doktor (Dr) pada program studi
Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

BADRUDIN

NIM: 31695104860

Pembimbing I/ Promotor :

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag.

Pembimbing II/ Co Promotor :

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA.

**PRODI HUKUM KELUARGA
PROGAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2019 M.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX. 1004
Phone & Fax: (0761) 855832 Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama Badrudin
Nomor Induk Mahasiswa 31695104860
Gelar Akademik Dr. (Doktor)
Judul Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara di Provinsi Riau Perspektif Maqashid Syari'ah.

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal, MA.
Penguji I / Ketua

Dr. Tuti Andriani, S. Ag., M. Pd.
Penguji II / Sekretaris

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
Penguji III

Prof. Dr. A. Husein Rilonga, MA.
Penguji IV

Dr. Jumni Nelli, M. Ag.
Penguji V

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag.
Penguji VI / Promotor

Dr. H. Mawardi M. Saleh, M. Ag.
Penguji VII / Co-Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan 26 Desember 2019

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) P.O. Box 1004 Telp./Fax: (0761) 855832
Website: <http://pasca-uin-suska.info> Email: pps@uin-suska.ac.id

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA (UJIAN PROMOSI DOKTOR)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi dengan itu menyetujui bahwa disertasi berjudul "Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*" yang ditulis oleh:

Nama : Badrudin
NIM : 31695104860
Tempat/ Tgl : Pulau Kijang, 18 Oktober 1986
Progam Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka (Ujian Promoso Doktor) Disertasi pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau,

Promotor,

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag.
NIP. 19710606 199703 1 002

Tgl. 2019

Co-Promotor,

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA.
NIP. 19690624 200112 1 003

Tgl. 2019

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disertasi yang berjudul: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Aneh Terlantar Dipelihara oleh Negara Di Provinsi Riau Dalam Perspektif *Maqāshid Shari'ah* yang ditulis oleh Saudara (BADRUDIN NIM 31695104860) Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 5 Desember 2019 dan dapat disetujui dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penguji 1 / Ketua

Tanggal : 2019

Tanggal 2015

Tanggal \ \ 201

Tanggal : 201

Tanggal : 20

Tanggal 20.....

Tanggal : 20

Tanggal : 20

Tanggal : 20

Tanggal : 20

Tanggal : 20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi dengan itu menyetujui bahwa disertasi berjudul "Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Di Provinsi Riau (Perspektif *Maqāshid Syari'ah*)" yang ditulis oleh:

Nama : Badrudin
NIM : 31695104860
Tempat/ Tgl : Pulau Kijang, 18 Oktober 1986
Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).

Untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Disertasi pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.


Promotor,

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag.
NIP. 19710606 199703 1 002

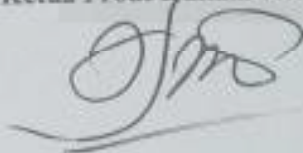

Tgl. 2019

Co-Promotor,

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA.
NIP. 19690624 200112 1 003


Tgl. 2019

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga



Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI

Disertasi yang berjudul: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Di Provinsi Riau (Perspektif *Maqashid Syari'ah*)" yang ditulis oleh Saudara. (BADRUDIN NIM 31695104860) Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 27 Agustus 2019 dan dapat disetujui dalam Sidang Ujian Tertutup pada Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., P.hD.
NIP. 19691130 199403 1 003

Tgl.

2019

Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
NIP. 19720628 200501 2 004

Tgl.

2019

Penguji (Penguji Utama)

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
NIP. 19540212 98103 1 007

Tgl.

2019

Penguji I (Promotor)

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag.
NIP. 19710606 199703 1 002

Tgl.

2019

Penguji II (Co Promotor)

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA.
NIP. 19690624 200112 1 003

Tgl.

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi dengan itu menyetujui bahwa disertasi berjudul "Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Dalam Praktik Kehidupan Berbangsa Di Provinsi Riau (Perspektif *Maqâshid Syariah* Tentang Nafkah Dan Hadhanah)" yang ditulis oleh:

Nama	: Badrudin
NIM	: 31695104860
Tempat/ Tgl	: Pulau Kijang, 18 Oktober 1986
Program Studi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Konsentrasi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).

Untuk diajukan dalam ujian Seminar Hasil Disertasi pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor,

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag.
NIP. 1971606 199703 1 002

Tgl. 2018

Co Promotor,

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA.
NIP. 19690624 200112 1 003

Tgl. 2018

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag.
Dosen Progam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Badrudin

Kepada Yth:
Direktur Progam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Badrudin
NIM	: 31695104860
Tempat/Tanggal Lahir	: Pulau Kijang, 18 Oktober 1986
Progam Studi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Konsentrasi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Judul	: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Dalam Perspektif <i>Maqāshid Syari'ah</i> .

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka pada Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 2019
Promotor,

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag.
NIP. 19710606 199703 1 002



Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA.
Dosen Progam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Badrudin

Kepada Yth:

Direktur Progam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Badrudin
NIM	: 31695104860
Tempat/Tanggal Lahir	: Pulau Kijang, 18 Oktober 1986
Progam Studi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Konsentrasi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Judul	: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Dalam Perspektif <i>Maqāshid Syari'ah</i> .

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka pada Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 2019
Co-Promotor,

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA.
NIP. 19690624 200112 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Badrudin

NIM : 31695104860

Tempat Tanggal Lahir: Pulau Kijang, 18 Oktober 1986

Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul "Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqāshid Syari'ah*", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam Disertasi ini, yang saya kutip hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 Desember 2019



Badrudin
NIM. 31695104860

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa semesta alam, dan samudera cinta, rahman, rahim, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi sebagai prasyarat memperoleh gelar Doktor (Dr) dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman, Amin.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya kepada yang terhormat:

1. Kepada Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultal Syarif Kasim Riau.
2. Kepada Prof. Dr. Afrizal M, MA, selaku Direktur Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Dr. Jumni Nelli, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Prof. Dr. K.H. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai Promotor dan Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA sebagai Co. Promotor dengan penuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan, namun juga telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam rangka menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.

5. Kepada para Dosen pengajar di Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah ihlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa-masa studi.
6. Kepada istri Ns. Sri Haryuni, S. Kep, yang telah membantu dan memberikan dorongan serta motifasi terhadap penulis, agar supaya penulis dapat menyelesaikan disertasinya dengan baik.
7. Kedua orang tuaku H. Ridwan dan Hj. Maspiati yang selama hidup beliau selalu memberikan motifasi, bantuan materiil dan do'a yang sangat membantu dalam rangka penulis menyelesaikan studi. Semoga hal itu menjadi amal baik yang diterima Allah SWT.
8. Kepada semua teman-teman yang mendukung, membantu, memberikan masukan serta memberikan arahan kepada punulis, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan, oleh karena kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaannya hanya kepada Allah penulis berdoa, semoga pengorbanan dan bantuan mereka dibalas dengan kebaikan. Penulis berharap semoga penelitian disertasi bermanfaat bagi penulis dan pembaca, terutama mereka yang mendalami kajian hukum keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), serta bermanfaat pula untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia di masa depan.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Bādrudin

NIM: 31695104860

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
LEMBARAN PENGESAHAN	
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA (UJIAN PROMOSI DOKTOR)	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP	
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI	
PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
KATA SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK 3 BAHASA	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Istilah	20
C. Pembatasan Masalah	22
D. Rumusan Masalah	22
E. Tujuan Penelitian	22
F. Manfaat Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORETIS	26
A. Fakir Miskin	26
1. Pengertian Fakir Miskin	26
2. Faktor Penyebab Kefakiran	46
3. Ciri-Ciri Orang Fakir	48
4. Cara Mengatasi Kefakiran	50
B. Anak Terlantar	52
1. Pengertian Anak	52
2. Pengertian Anak Terlantar	56
3. Ciri-Ciri Anak Terlantar	57
4. Konsep Perlindungan Anak	59
5. Konsep Kesejahteraan Anak	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kesejahteraan Sosial.....	64
b. Kesejahteraan Anak.....	66
6. Konsep Pemeliharaan Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam.....	70
C. Konsep <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	72
1. Pengertian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	72
2. Dasar Hukum <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	75
3. Pembagian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	79
a. Pembagian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Dari Segi Masalah Yang Harus Dipelihara.....	79
1) <i>Maslahah Dharuriyah</i>	79
2) <i>Maslahah Hajiah</i>	84
3) <i>Maslahah Tahsiniah</i>	86
b. Pembagian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Dari Segi Tingkatan <i>Maqashid</i> Yang Ada.....	87
1) <i>Maqashid Ashliyyah</i>	87
2) <i>Maqashid Tabi'ah</i>	87
c. Pembagian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Dari Segi Kandungan <i>Maqâshid</i>	88
1) <i>Maqashid Ammah</i>	88
2) <i>Maqashid Khashshah</i>	89
3) <i>Maqashid Juz'iyah</i>	89
D. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.....	89
BAB III METODE PENELITIAN.....	99
A. Jenis Penelitian.....	99
B. Tempat Penelitian.....	99
C. Pendekatan Penelitian.....	100
D. Sumber Data.....	100
1. Data Primer.....	101
2. Data Sekunder.....	101
E. Teknik Pengumpulan Data.....	101
F. Teknik Analisis Data.....	102
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	105
A. Profil Provinsi Riau.....	105
1. Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau.....	105
2. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim Provinsi Riau.....	108
3. Visi dan Misi Provinsi Riau.....	110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jumlah Penduduk Provinsi Riau.....	112
5. Pemerintahan Provinsi Riau.....	113
6. Kepegawaian.....	113
7. Jumlah Penduduk Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Provinsi Riau.....	114
B. Analisis Pasal 34 UUD 1945 Di Provinsi Riau.....	116
1. Implementasi Pasal 34 UUD 1945 di Provinsi Riau	116
a. Kategori Yang Menjadi Masalah Dalam Bidang Sosial....	121
b. Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan.....	122
c. Dampak Kemiskinan Dalam Masalah Sosial.....	127
d. Faktor Penyebab Adanya Anak Terlantar.....	135
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD di Provinsi Riau.....	139
a. Kondisi penyebab kemiskinan.....	150
b. Kategori penyebab kemiskinan.....	152
c. Dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan.....	154
3. Solusi dalam syari'at Islam terhadap Pasal 34 UUD 1945 di Provinsi Riau Perspektif <i>maqâshid syarî'ah</i>	159
a. Solusi dalam syariat Islam	
1) Membebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin.....	178
2) Perbanyak akses untuk mendapatkan pendidikan beasiswa.....	179
3) Tingkatkan Peran Serta Masyarakat.....	179
b. Solusi dalam Perspektif <i>maqâshid syarî'ah</i>	
1) <i>Hifzh al-din</i> (memelihara agama).....	201
2) <i>Hifzh al-nafs</i> (memelihara jiwa).....	203
3) <i>Hifzh al-nasl</i> (memelihara keturunan).....	209
4) <i>Hifzh al-aql</i> (memelihara akal).....	213
5) <i>Hifzh al-maal</i> (memelihara harta).....	220

BAB V PENUTUP.....	231
A. Kesimpulan.....	231
B. Saran Dan Rekomendasi.....	234

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
TOEFL
TOAFL
BIODATA PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data anak terlantar di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017.....	16
Tabel 2 : Data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017.....	17
Tabel 3 : Data Jumlah penduduk Provinsi Riau.....	112
Tabel 4 : Data kepegawaian di Provinsi Riau.....	113
Tabel 5 : Data jumlah PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.....	114
Tabel 6 : Data penduduk fakir miskin Per Kabupaten/ Kota (Jiwa) di Provinsi Riau Riau.....	114
Tabel 7 : Penduduk Anak Telantar Per Kabupaten/ Kota di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017.....	115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
APBN	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
APIUK	: Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan
DLE	: Dan Lain-lain.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
FPSS	: Fisik Phisikis Sosial dan Spiritual
H	: Hijriyah
HAM	: Hak Asasi Manusia.
HLM	: Halaman
HR	: Hadist Riwayat.
IAIN	: Institut agama Islam Negeri
INPRES	: Instruksi Presiden.
JKA	: Jangka Kerja Advokasi
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
K	: Kasasi.
KEPRES	: Keputusan Presiden.
KH	: Kiyai Haji
KHI	: Kompilasi Hukum Islam.
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
KOMNAS	: Komisi Nasional
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum.
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat.
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
M	: Masehi
MA	: Mahkamah Agung
M. Hum	: Magister Hukum
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PA	: Pengadilan Agama.
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pdt. G	: Perdata Gugatan.
Pdt. P	: Perdata Permohonan.
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PSKS	: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PSG	: Pusat Studi Gender
PSW	: Pusat Studi Wanita
PT	: Pengadilan Tinggi
QA	: Al-Qur'an Surah
RA	: <i>Radhiyallahu 'anhu</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang.
RUU HMPA	: Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama.
SDM	: Sumber Daya Manusia
SH	: Sarjana Hukum
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SAW	: <i>Shallallahu Alaihi Wa Salam.</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa ta'ala.</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UIN	: Universitas Islam Negeri.
UUD	: Undang-Undang Dasar 1945.
W	: Wafat
WIL	: Wilayah Idaman Lain



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/ 1987 dan 1543.b/U/1987, Sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A. Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ﺙ	-	ط	th
ﺫ	B	ظ	zh
ﺽ	T	ع	'
ﺬ	Ts	غ	gh
ﺞ	J	ف	f
ﺢ	H	ق	q
ﺦ	Kh	ك	k
ﺪ	D	ل	l
ﺬ	Dz	م	m
ﺭ	R	ن	n

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Z	و	w
هـ	S	هـ	h
ي	Sy	ي	ُ
ش	Sh	ي	y
ذ	Dh		

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “I”, dhammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misal: قال menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = Î misal: قيل menjadi : *qila*

Vokal (u) panjang = Û misal: دون menjadi : *duna*

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal = قول menjadi = *qawlun*

Diftong (ay) = ي misal = خير menjadi = *khayrun*



D. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Badrudin, NIM 31695104860: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Pasal 34 UUD 1945 menjelaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan terlantar masih menjadi masalah besar bagi negara Indonesia. Namun merajalela dimana-mana. Ada di kolong jembatan, dipinggir toko, berkeliaran di jalan raya tanpa pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti. Di Indonesia diperkirakan jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Adapun data anak terlantar di Dinas Sosial Propinsi Riau tercatat 3.517 jiwa pada tahun 2017. Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017.

Ada tiga rumusan masalah yang peneliti bahas (1) Bagaimana implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara di Provinsi Riau. (3) Bagaimana solusi menurut syari'at Islam terhadap Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara perspektif *maqâshid syari'ah*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan dua sumber, yaitu: sumber data primer dan sekunder. Teknis analisis data sesuai dengan data yang digunakan adalah kajian isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Masih ada kebijakan dari pemerintah yang belum tepat sasaran untuk mengatasi fakir miskin dan anak terlantar. Seperti di Kecamatan Tampan tepatnya di pasar pagi arengka, masih ada ditemukan anak-anak yang putus sekolah, bekerja di pasar, berjualan di perempatan lampu lalu lintas dan meminta-minta di jalanan yang belum tertangani oleh pemerintah terkait. *Kedua*, Pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan SDA, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, rendahnya kesehatan, beban keluarga, tidak adanya penyediaan rumah singgah, tidak adanya yayasan pendidikan non formal bagi anak-anak terlantar. *Ketiga*, Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan *berusaha*. Namun juga harus ada usaha untuk menolong orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja. Pemberdayaan zakat, wakaf dan sedekah.

Kata kunci: Implementasi, Pasal 34 UUD 1945, *Maqashid Syari'ah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Badrudin, NIM 31695104860: Implementation of Article 34 of the 1945 Constitution Concerning the Poor and Abandoned Children Cared for by the State in Riau Province Perspective Maqashid Syari'ah.

Article 34 of the 1945 Constitution explains that the poor and neglected children are cared for by the state. The poor and displaced are still a big problem for Indonesia. They are rampant everywhere, under the bridge, alongside shops, roaming the highways with no jobs and no place to live. In Indonesia the number of displaced children is estimated at 4.1 million. In March 2018, the number of poor people in Indonesia reached 25.95 million people (9.82 percent). As for the data of neglected children in the Social Service of Riau Province, there were 3,517 people in 2017. While the data of the poor in the Social Service of Riau Province, there were 303,438 people in 2017.

There are three formulations of the problem that researchers discuss (1) How the implementation of Article 34 of the 1945 Constitution concerning the poor and displaced children is maintained by the state. (2) Are the obstacles faced by the government in the implementation of Article 34 of the 1945 Constitution concerning the poor and displaced children maintained by the State in Riau Province. (3) How is the solution according to Islamic sharia to Article 34 of the 1945 Constitution concerning the poor and displaced children maintained by the state perspective maqâshid syarī'ah

This research uses the type of field research (research field). The research approach used is a qualitative approach. Researchers use two sources, namely: primary and secondary data sources. Technical analysis of data in accordance with the data used is a content analysis (content analysis).

The results of this study are First, there are still policies from the government that have not been well targeted to address the poor and displaced children. Like in the Tampan Subdistrict precisely at the Arengka morning market, there are still children who drop out of school, work in the market, sell at traffic lights and beg on the streets that have not been handled by the relevant government. Second, education is too low, lazy to work, limited natural resources, limited employment, limited capital, low health, family burdens, lack of shelter provision, no non-formal education foundations for abandoned children. Third, everyone who lives in an Islamic society is required to work or earn a living. Every individual must overcome poverty by using his weapon, namely by trying. But there must also be an effort to help weak people who are unable to work. Empowerment of zakat, endowments and alms.

Keywords: Implementation, Article 34 of the 1945 Constitution, *Maqashid Shari'ah*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

بدر الدين ، نيم ٣١٦٩٥١٠٤٨٦٠ : تنفيذ المادة ٣٤ من دستور عام ١٩٤٥ بشأن الأطفال الفقراء والمهجرين الذين ترعاهم الدولة في محافظة رياو ، مقشيد سيارية.

تشرح المادة ٣٤ من دستور عام ١٩٤٥ أن الأطفال الفقراء والمهمشين يتلقون الرعاية من الدولة. لا يزال الفقراء والمشردين يمثلون مشكلة كبيرة لإندونيسيا. إنهم متقشون في كل مكان ، تحت الجسر ، بجانب المحلات التجارية ، ويتجولون في الشوارع بدون وظائف ومكان محدد للعيش فيه. في إندونيسيا ، يقدر عدد الأطفال النازحين بـ ٤٠١ مليون. في مارس ٢٠١٨ ، بلغ عدد الفقراء في إندونيسيا ٢٥,٩٥ مليون شخص (٩,٨٢ في المائة). بالنسبة لبيانات الأطفال المهمشين في الخدمة الاجتماعية في مقاطعة رياو ، كان هناك ٣٠٥١٦ شخصاً في عام ٢٠١٧. في حين أن بيانات الفقراء في الخدمة الاجتماعية في مقاطعة رياو ، كان هناك ٣٠٣,٤٣٨ شخصاً في عام ٢٠١٧

هناك ثلاث صيغ للمشكلة ناقشها الباحثون (١) كيف تتم المحافظة على تنفيذ المادة ٣٤ من دستور ١٩٤٥ بشأن الأطفال الفقراء والمشردين من قبل الدولة. (٢) ما إذا كانت العقوبات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ المادة ٣٤ من دستور ١٩٤٥ بشأن الأطفال الفقراء والمشردين تحتفظ بها الدولة في مقاطعة رياو. (٣) كيف هو الحل وفقاً للشرعية الإسلامية للمادة ٣٤ من دستور ١٩٤٥ بشأن الأطفال الفقراء والمشردين التي تحتفظ بها الدولة منظور مقاصد الشريعة

يستخدم هذا البحث نوع البحث الميداني (مجال البحث) ، ونهج البحث المستخدم هو منهج نوعي. يستخدم الباحثون مصدرين ، هما: مصادر البيانات الأولية والثانوية. التحليل الفني للبيانات وفقاً للبيانات المستخدمة هو تحليل المحتوى (تحليل المحتوى).

نتائج هذه الدراسة هي أولاً ، لا تزال هناك سياسات من الحكومة لم يتم استهدافها جيداً لمعالجة الأطفال الفقراء والمشردين. كما هو الحال في منطقة منطقة وسيم على وجه التحديد في سوق Arengka الصباحي ، لا يزال هناك أطفال يتركون المدرسة ويعملون في السوق ويبيعون عند إشارات المرور ويتوسلون في الشوارع التي لم تتعامل معها الحكومة المعنية. ثانياً ، التعليم منخفض جداً ، كسول عن العمل ، وموارد طبيعية محدودة ، وفرص عمل محدودة ، ورأس مال محدود ، وصحة منخفضة ، وأعباء أسرية ، ونقص توفير المأوى ، وعدم وجود مؤسسات تعليمية غير رسمية للأطفال المهجورين. ثالثاً ، يجب على كل شخص يعيش في مجتمع إسلامي العمل أو كسب الرزق. يجب على كل فرد التغلب على الفقر باستخدام سلاحه ، أي عن طريق المحاولة. ولكن يجب أيضاً بذل جهد لمساعدة الأشخاص الضعفاء غير القادرين على العمل. تمكين الزكاة والأوقاف والصدقات.

الكلمات المفتاحية : التنفيذ ، المادة ٣٤ من دستور ١٩٤٥ ، مقاصد الشريعة.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Pengaturan ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.¹ Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa negara itu tidak boleh melaksanakan aktivitasnya hanya berdasarkan atas kekuasaan saja tetapi harus melaksanakan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam bernegara hukum yang tujuan akhir dari bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini bahagia.² Sesuai dengan konsep dari negara Indonesia yaitu negara hukum Pancasila yang bertumpu pada setiap sila-sila yang ada.³

Salah satu tujuan dari dibentuknya negara Indonesia termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam alinea keempat yakni “memajukan kesejahteraan umum”.⁴ Berdasarkan tujuan negara tersebut dapat dikatakan bahwa negara dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat

¹ Undang-Undang Dasar Re publik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, (Surabaya: Apollo Lestari, 2014), hlm. 28.

² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 43.

³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

⁴ Undang-Undang Dasar Re publik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 3.



bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

Untuk memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya di semua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-nak yang terlantar dipelihara oleh negara”.⁵ Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) tersebut terdapat makna “dipelihara oleh negara”. Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara.

Anak⁶ mempunyai hak kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari generasi penerus perjuangan dalam pencapaian cita-cita bangsa.

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶ Anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Menurut Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tuna sebagai mana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam ‘disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Lihat Saifuddin Mujtaba *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai generasi penerus maka seharusnya anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melakukan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.⁷ Namun seiring dengan perkembangan globalisasi, banyak muncul permasalahan sosial yang terjadi di sebagian besar daerah perkotaan khususnya di daerah Provinsi Riau. Salah satu di antaranya adalah masalah fakir miskin dan anak terlantar⁸ dan dalam hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh Dinas Sosial yang memang sasaran dan prioritasnya adalah menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).⁹

Seorang anak dikatakan terlantar bukan hanya karena ia sudah tidak memiliki kedua orang tua saja, tetapi terlantar dapat juga diartikan ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (seperti perhatian kasih sayang dari orangtua, kebutuhan jasmani dan mental), hak untuk memperoleh pendidikan yang layak minimal 9 tahun, pengembangan diri, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi secara keseluruhan karena alasan kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak

⁷ [Http://dinsos.pekanbaru.go.id/index.php?view=article&catid=7:sasaran-prioritas](http://dinsos.pekanbaru.go.id/index.php?view=article&catid=7:sasaran-prioritas). Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.

⁸ Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak, Cet. 1 (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 8.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Cet. 1, (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 8.



mampuan ataupun kesengajaan dari orangtua anak tersebut, sehingga anak-anak ini menghabiskan waktunya di luar ruangan atau di jalanan.¹⁰

Anak terlantar¹¹ tersebut bertahan hidup dengan melakukan aktivitas disektor informal, seperti mengamen, menyemir sepatu, menjual koran, mengelap kendaraan, memulung barang bekas, mengemis, dan lain sebagainya. Dikarenakan pergaulan bebas di jalanan, tidak jarang anak-anak ini melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, mencuri, dan terlibat perdagangan sex karena terdesak oleh keadaan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah dan publik terhadap kehidupan anak-anak memang semakin meningkat, namun dibalik itu semua ternyata semakin tingginya perhatian yang diberikan oleh pemerintah serta masyarakat, tidak berdampak terhadap jumlah penurunan anak terlantar.

Sedangkan fakir miskin, dan anak-anak terlantar masih menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Namun merajalela dimana-mana, dari yang ada di kolong jembatan, dipinggir-pinggir toko dan berkeliaran di jalan raya tanpa pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti. Kemiskinan yang saat ini menjerat Indonesia sepertinya tidak pernah bisa lepas dari kehidupan yang ada.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu bangsa tergantung dari 2 hal yaitu :

1. Tingkat pendapatan nasional rata-rata dan

¹⁰ Ibid., hlm. 8.

¹¹ Anak yang berusia antara 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan maupun tempat umum. Lihat Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm. 1493.



2. Sempitnya lapangan pekerjaan dan kesenjangan dari distribusi pendapatan dari Negara bersangkutan.

Masalah kemiskinan selalu menjadi pusat perhatian karena jelas kemiskinan memberikan dampak yang buruk dan besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kemiskinan menyebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti pendidikan dan keterampilan, sehingga mereka tidak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak serta kalah bersaing dengan manusia-mansia yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Dan imbasnya adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, phisikis, sosial dan spiritual mereka. Dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik, phisikis, sosial dan spiritual (FPSS) seperti yang dikatakan diatas, maka akan terjadi keterlantaran terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar,¹² yang berakibat terjadinya pemenuhan gizi buruk, pemeliharaan kesehatan yang sangat minim dan bahkan sampai pada terjadinya eksploitasi, perdagangan anak, dan tindak kekerasan. Lebih jauh lagi dapat berakibat pada terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pada kaum perempuan.

Salah satu faktor adanya para fakir miskin dan anak-anak yang terlantar adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan ditambah lagi dengan ledakan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Hal ini

¹² Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar. Lihat Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin sulit dan ketat terutama pada sektor pekerjaan formal, akibatnya hanya mereka yang mempunyai nilai tambah yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga timbulah masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan sosial terhadap individu-individu yang kurang dibekali sumber daya manusia (SDM) yang mempunyi. Merembaknya “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar”.¹³ Merupakan persoalan sosial yang kompleks yang saat ini menjadi masalah besar yang ada. Hidup menjadi pengemis, pengamen, gelandangan dan anak jalanan atau terlantar memang bukan impian dari semua orang. Keterbatasan serta minimnya perhatian dari pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat yang hidup disekelilingnya memaksa mereka untuk menjalani kehidupan yang keras dan hidup dalam ketidak pastian. Banyaknya pengemis dan gelandangan di kota-kota di Indonesia tidak boleh dilihat sebagai akibat pilihan individual, tetapi akibat masalah struktural yang merupakan tanggung jawab negara. Adalah kenyataan di desa tidak cukup tersedia lapangan kerja sehingga terjadilah migrasi ke kota.

Keberadaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar¹⁴ merupakan akibat langsung dari pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak yang merupakan bagian dari keluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, phisikis, sosial, dan spiritual (FPSS) sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan makan, pendidikan, rasa nyaman hingga tidak mampu menjalankan fungsi sosial sebagai anak secara wajar. Oleh karenanya, mereka melakukan

¹³ Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23



berbagai upaya agar mereka dapat untuk memenuhi kebutuhan dimaksud. Mereka melakukan hal tersebut dengan turun ke jalan menjadi, pengemis dan anak jalanan dengan cara meminta-minta di jalanan, di sekitar rambu-rambu lalu lintas dan di pasar-pasar tradisional, bahkan untuk bertempat merekapun tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti. Dengan adanya hal ini tentunya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi individu, masyarakat sekitar dan suatu bangsa. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa¹⁵ dan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.¹⁶

Di Indonesia sendiri masih belum begitu maksimal dalam penanganan masalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.¹⁷ Sehingga masih banyak sekali kasus ketimpangan sosial yang terjadi yaitu bergelandang dan meminta-minta yang dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak dibawah umur dan lansia. Dan hal ini dilakukan karena kurangnya kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi dirinya dan keluarganya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁶ Undang-Undang Dasar Rebuglik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya keberadaan anak-anak terlantar,¹⁸ pengemis dan gelandangan menjadi ruang eksploitatif bagi preman yang mempunyai kekuasaan disuatu wilayah dimana anak-anak terlantar dan gelandangan pengemis menggantungkan nasib di wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan mereka juga cenderung akrab dengan tindak kriminal, mereka juga rentan terkena virus, narkoba, free sex, dan penyakit moral lainnya yang menghancurkan masa depan mereka. Tentunya, kita harus prihatin akan kondisi tersebut, di tengah sistem kehidupan yang semakin global, apa jadinya bila sebagian besar anak-anak Indonesia khususnya tidak mengenyam pendidikan, tidak mendapatkan hak-haknya dan terus-terusan hidup di jalanan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. sehingga mereka terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum tanpa tempat tinggal yang layak dan jelas.

Masalah ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan, dimana orang yang miskin seharusnya menjadi tanggung jawab negara, namun hingga saat ini justru orang miskin dalam hal ini adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Mereka tetap saja berada di jalan-jalan dan meminta-minta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak mengherankan jika para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tetaplah orang yang harus

¹⁸ Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Lihat Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Op. Cit., hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka selalu merasakan kesulitan untuk mengakses pekerjaan, mendapatkan layanan kesehatan yang layak, hingga pendidikan bagi anak-anak mereka. Serta mendapatkan kemudahan jaminan sosial lainnya dari negara, sehingga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka para fakir miskin dan anak-anak yang terlantar perlu adanya sumber daya aparatur yang berkompeten, guna untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke 4, pada pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- 1) Menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.¹⁹
- 2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.²⁰
- 3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.²¹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 504 Ayat (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Dan Ayat (2) berbunyi Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur

¹⁹ Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 23

²¹ *Ibid.*, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal di ataslah yang sering digunakan oleh Polisi maupun Satpol Pamong Praja untuk melakukan razia penertiban terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar, dengan ini juga memberi gambaran bahwa pemerintah dalam menangani perlindungan terhadap gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar belum maksimal dan tidak mau mengambil pusing untuk menanganinya. Mereka yang selama ini menjadi miskin dan melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang ditempat-tempat umum tentunya bukanlah kehendak dari dirinya. Jika ada pilihan, mereka yang rata-rata menjadi pengemis atau menggelandang tentunya memilih pekerjaan yang tetap, dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya serta dapat menjalani kehidupan yang layak dan juga mendapat perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

Memang untuk penanganan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar²² merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah, orang tua atau keluarga, melainkan juga setiap orang yang berada dekat dengan mereka. Mengenai masalah anak terlantar banyak hal yang sebenarnya dapat diatasi, seperti adanya panti-panti yang didirikan untuk menampung serta merawat mereka dan menangani akar masalah dari adanya anak terlantar. Tetapi karena kurangnya tenaga pelaksana dan minimnya dana yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, maka panti-

²² Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.



panti yang sudah berdiri tidak berfungsi dengan baik dan maksimal. Para fakir miskin dan anak-anak yang terlantar berhak atas perlindungan dan juga bisa mendapat kehidupan yang layak seperti halnya masyarakat disekelilingnya yang berkehidupan cukup dan tidak terjat dalam kemiskinan, demi terwujudnya kesejahteraan yang adil dan beradap sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Hukum Islam²³ di dalam Al-Qur'an dan Hadits atau pendapat para fuqoha tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan namun Hukum Islam menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu dengan fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolak ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan. Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Sehubungan dengan hal di atas perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar²⁴ dalam pandangan atau perspektif Islam adalah orang-orang yang harus mendapatkan hak-haknya. Dengan alasan bahwa Islam sendiri juga memberi perlindungan terhadap mereka melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para Imam madzhab. Hakikatnya, dalam

²³ Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an atau hukum syarak. Lihat Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 519.

²⁴ Undang-Undang Dasar Rebuglik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, harta adalah hak mutlak Allah swt, karena Dialah yang menjadikan dan menganugerahkannya, manakala manusia hanyalah wakil (*khalifah*) yang ditugaskan untuk menjaga, membangunkan dan membelanjakan harta mengikut suruhan dan kerendahan-Nya. Allah swt menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.²⁵ Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.²⁶

Menurut Tafsir Jalalain menjelaskan (berimanlah kalian) artinya, tetaplah kalian beriman (kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah) di jalan Allah (sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya) yakni dari harta orang-orang yang sebelum kalian dan kelak Dia akan menguasakannya kepada orang-orang yang sesudah kalian. Ayat ini diturunkan sewaktu perang 'Ursah atau dikenal dengan nama perang Tabuk. (maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan hartanya) ayat ini mengisyaratkan kepada apa yang telah dilakukan oleh sahabat Usman r.a. (mereka akan memperoleh pahala yang besar).²⁷

²⁵ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004), hlm. 485.

²⁷ Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Terjemah: Bahrum Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 2788-2789.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya harta yang mereka miliki adalah hanya milik Allah swt, didalamnya terdapat bagain-bagaian dari para fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar. Islam memandang Tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia, tiga perkara tersebutlah yang harus dapat dipenuhi oleh seseorang yang dianggap mampu dan tidak terjat dalam kemiskinan. Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai sebuah problem kehidupan yang semuanya ada solusi dan jalan keluar. Dan Islam menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan dan direalisasikan atau paling tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka sehingga dapat hidup layak seperti halnya orang-orang yang ada disekelilingnya yang mempunyai kehidupan yang berkecukupan. Tapi bukan berarti, dengan berusaha mengentaskan kemiskinan tersebut.

Memang, menyelesaikan masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar di jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikan nya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Khususnya anak-anak adalah potret masa depan Indonesia, maka tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan yang sekarang ini dirasakan anak-anak terlantar yang ada di negara ini. Penanganan masalah sosial yang sekarang ada masih belum



menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat jalan ditempat, serta belum di dukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalau pun di bantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.²⁸

Dari sejumlah uraian diatas memperlihatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar²⁹ tetap sebagai kelompok yang paling beresiko mengalami ancaman berbagai tindak kekerasan fisik, phisikis, seksual dan pembunuhan. Semakin mereka berada di jalan, semakin berpotensi timbulnya tindak kekerasan terhadap mereka. Minimnya perlindungan yang mereka miliki, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, pada akhirnya membuat mereka tetap harus menghadapi situasi dan ancaman yang dihadapi mereka setiap waktu. Karena mereka semua bukanlah individu-individu yang seharusnya berada di jalan, mereka semua memerlukan perlindungan dan perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan perlindungan fisik, phisikis, sosial dan spiritual. Sehingga mereka dapat hidup nyaman dan terbebas dari jerat kemiskinan.

Dari fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak

²⁸ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, [www.Policy.hu/suharto/modul a/makindo 40. htm](http://www.Policy.hu/suharto/modul%20a/makindo40.htm)/(Online), Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.

²⁹ Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka seperti, hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah dan hadhanah yang baik.

Dari beberapa wilayah kota/ kabupaten atau provinsi lain, masih banyak fakir miskin dan anak-anak yang telantar, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya secara wajar, tidak memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang layak bahkan banyak anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan menjadi gelandangan atau pengemis, karena di telantarkan orang tuanya.

Di Indonesia di perkirakan jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa pada bulan Maret 2018³⁰, sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen).³¹ Adapun data anak terlantar di Dinas Sosial Propinsi Riau tercatat 3.517 jiwa anak terlantar pada tahun 2017.³² Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017, dengan perincian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ <https://www.antaranews.com/berita/366329/berapa-jumlah-anak-yatim-di-indonesia>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

³¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

³² http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=132. Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2018.

Tabel 1

Data anak terlantar di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017.³³

NO	KABUPATEN/KOTA	JIWA
1	Kota Pekanbaru	256
2	Kabupaten Indragiri Hulu	124
3	Kabupaten Rokan Hulu	193
4	Kabupaten Kampar	1.230
5	Kota Dumai	151
6	Kabupaten Pelalawan	968
7	Kabupaten Bengkalis	0
8	Kabupaten Siak	48
9	Kabupaten Kuantan Singgingi	285
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	158
11	Kabupaten Indragiri Hilir	80
12	Kabupaten Rokan Hilir	24
	JUMLAH	3.517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm. 28.

**Tabel 2**

Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun

2017.³⁴

NO	KABUPATEN/KOTA	JIWA
1	Kota Pekanbaru	13.062
2	Kabupaten Indragiri Hulu	9.022
3	Kabupaten Rokan Hulu	7.183
4	Kabupaten Kampar	13.646
5	Kota Dumai	9.423
6	Kabupaten Pelalawan	10.972
7	Kabupaten Bengkalis	104.895
8	Kabupaten Siak	40.981
9	Kabupaten Kuantan Singgingi	10.730
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	500
11	Kabupaten Indragiri Hilir	54.320
12	Kabupaten Rokan Hilir	28.704
	JUMLAH	303.438

Fakir miskin adalah orang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi

³⁴ *Ibid.*, hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dirinya dan atau keluarganya.³⁵ Sedangkan anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan tanggung jawabnya sebagai kewajiban terhadap anak-anaknya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara jasmani maupun sosial (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak).³⁶

Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan Negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.³⁷ Disamping itu, Pemerintah Propinsi Riau juga sudah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

Menurut peneliti realita yang terjadi, kita tidak bisa menutup mata bahwa di Provinsi Riau hampir disetiap lokasi keramaian dan persimpangan jalan bisa kita lihat banyaknya fakir miskin dan anak terlantar, berdasarkan fenomena inilah kami berkeinginan melihat implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam melindungi hak-hak anak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai salah satu instansi yang berwenang.

³⁵ Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm. 12.

³⁶ Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Lihat Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum, Op. Cit.*, hlm. 13.

³⁷ Tim Legality. *Undang-Undang Perlindungan Anak, Op. Cit.*, hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut peneliti permasalahan fakir miskin dan anak terlantar tidak lepas dari tingginya tingkat kompleksitas permasalahan penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga ini menjadi fenomena yang sudah mulai kelihatan di Provinsi Riau. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan keluarga tempat mereka tinggal tampaknya belum banyak dilakukan, padahal keluarga merupakan pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama yang memungkinkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Dengan demikian, masih ada kebijakan dari pemerintah yang belum tepat sasaran untuk mengatasi anak terlantar ini. Seperti contohnya di Kecamatan Tampan tepatnya di pasar pagi arengka, masih ada ditemukan anak-anak yang putus sekolah, bekerja di pasar, berjualan di perempatan lampu lalu lintas dan meminta-minta di jalanan yang belum tertangani oleh pemerintah terkait.

Meskipun sudah menyediakan rumah singgah atau panti untuk anak terlantar³⁸ dan juga membuat undang-undang, kebijakan, serta banyaknya lembaga yang berkenaan dengan permasalahan anak terlantar namun masalah anak terlantar masih tetap ada. Mengingat jumlah peningkatan anak terlantar di Provinsi Riau dengan mudah dapat diperhatikan dengan jelas sebab terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, penanganan yang nyata (*real*) dari pemerintah sangat diperlukan untuk kesejahteraan hidup anak dikarenakan permasalahan sosial yang satu ini sudah menjadi tanggung jawab dari Dinas

³⁸ Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. (Pemerintah Provinsi Riau Dinas Sosial Tahun 2017). hlm. II-26.



Sosial Provinsi Riau sesuai tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh undang-undang terhadap penanganan anak terlantar.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Provinsi Riau yang menangani anak terlantar dan telah diamanatkan oleh konstitusi yang tertuang di dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.³⁹ Maka ini harus diatasi semaksimal mungkin, efektif, terorganisir dan langsung ke akar permasalahannya karena anak terlantar dipelihara oleh negara, artinya bahwa negara dalam hal ini pemerintah wajib memelihara, merawat dan menjaga seluruh anak terlantar yang terdapat di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud disertasi dengan judul: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

B. Definisi Istilah

Implementasi : Penerapan atau pelaksanaan.⁴⁰

Fakir : (1) Miskin berkekurangan dalam hidup (2) Orang yang sengaja membuat dirinya hidup berkekurangan misalnya

³⁹ Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 374.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hidup meminta-minta, demi memperoleh kesempurnaan batin.⁴¹

Miskin : Tidak berharta, berkekurangan dalam hidup karena penghasilan yang rendah atau sangat rendah; di Indonesia masih banyak orang yang harus di tinggalkan hidupnya.⁴²

Fakir Miskin : 1 kaum fakir dan kaum miskin, 2 para fakir yang (sengaja) hidup berkekurangan.⁴³

Anak Terlantar : Anak yang berusia antara 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan maupun tempat umum.⁴⁴

Maqâshid Asy Syarî'ah: (*Al-Maqâshid* jamak dari kata *al-maqsid* yang berarti tujuan). Tujuan-tujuan syariat. Dalam ilmu ushul fikih, bahasan *maqâshid asy syarî'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.⁴⁵

⁴¹ Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm. 402.

⁴² *Ibid.*, hlm. 903.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 403.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 1493.

⁴⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang di atas tidaklah semuanya diteliti secara komprehensif, akan tetapi terdapat beberapa pembatasan dalam kajian ini. *Pertama*, pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau. *Kedua*, analisis tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di Provinsi Riau perspektif *maqâshid syari'ah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau ?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau ?
3. Bagaimana solusi menurut syari'at Islam dalam implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara perspektif *maqâshid syari'ah* ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisa implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Untuk memahami dan menganalisa kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau.
3. Untuk memahami dan menganalisa solusi menurut syari'at Islam dalam implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara perspektif *maqâshid syari'ah*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi Mahasiswa/i Progam Doktor Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
 - b. Supaya dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
 - c. Sebagai wacana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi di lembaga badan hukum (LBH), Pengadilan Agama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot khususnya dalam: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Istilah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai kajian teoritis. Kajian teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teoritis akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk itu bab ini memuat tentang: Landasan Teoritis, (A) Fakir Miskin (1) Pengertian Fakir Miskin (2) Faktor Penyebab Kefakiran (3) Ciri-Ciri Orang Fakir (4) Cara Mengatasi Kefakiran. (B) Anak Terlantar (1) Pengertian Anak (2) Pengertian Anak Terlantar (3) Ciri-Ciri Anak Terlantar (4) Konsep Perlindungan Anak (5) Konsep Kesejahteraan Anak (6) Konsep Pemeliharaan Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam. (C)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* (1) Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah* (2) Dasar Hukum *Maqashid Al-Syari'ah* (3) Pembagian *Maqashid Al-Syari'ah*. (D) Tinjauan Penelitian Yang Relevan.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian, menerangkan (A) Jenis Penelitian, (B) Pendekatan Penelitian, (C) Sumber Data (1) Data Primer (2) Data Sekunder, (D) Teknik Analisis Data. Hal ini bertujuan agar dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV membahas hasil penelitian, pada bagian pertama dengan paparan yang berisi (A) Profil Provinsi Riau: (1) Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau. (2) Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim Provinsi Riau. (3) Visi dan Misi Provinsi Riau. (4) Jumlah Penduduk Provinsi Riau. (5) Pemerintahan Provinsi Riau. (6) Jumlah Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Di Provinsi Riau. (B) Analisis Pasal 34 UUD 1945: (1) Implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau. (2) Kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau. (3) Solusi menurut syari'at Islam dalam implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara perspektif *maqâshid syarî'ah*.

Bab V merupakan bab penutup dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Fakir Miskin

1. Pengertian Fakir Miskin

Fakir (dalam bahasa Arab ditulis *faqr*) secara *etimologi* berasal dari *fi'il madi* yang berupa *lafaz faqara* yang berarti melubangi, menggali.⁴⁶ Kemudian apabila kata *faqara* dibaca “u” huruf fa’nya, maka akan sama artinya dengan kata *faqir* yang bermakna menjadi miskin.⁴⁷ Namun menurut kamus bahasa Indonesia kata fakir diartikan secara langsung dengan menyengajanya seseorang untuk menderita kekurangan, atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin.⁴⁸ Sedangkan secara terminologi fakir di definisikan dengan berbagai macam makna, sesuai dari segi apa fakir itu tinjau.

Secara umum fakir juga di pandang sebagai ketidak mampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ketidak mampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Melihat pandangan fakir secara umum, tentu hampir serupa dengan kata miskin yang juga dimaknai dengan orang yang

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustakan Progressif, 1997), hlm. 1066

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 1066

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI) Offline, versi 3.0.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Sehingga dia dihina karena kemiskinannya.⁴⁹

Fakir adalah orang yang tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan halal, atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi, dalam gambaran hasilnya itu kurang dari 50% dari kebutuhan.

Contoh, 1 hari kebutuhan 10 ribu, dia punya uang atau penghasilan tapi dibawah 5 ribu atau tidak punya harta atau kerjaan yang halal sama sekali.

Sedangkan kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda.⁵⁰ Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata ke fakiran. Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin yang berarti orang yang sangat kekurangan.⁵¹ Di dalam kamus *lisanu al-'Arabi*, pengertian kata miskin dibedakan dengan kata faqir. Di sana dijelaskan bahwa kondisi miskin masih lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi faqir. Faqir berarti tidak memiliki apapun sedangkan miskin masih memiliki sebagian harta.⁵² Dalam bahasa Arab, kata miskin berasal dari kata *sakana* yang

⁴⁹ Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 166.

⁵⁰ Lukman Ali Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Cet. Ke 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 660

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 220.

⁵² Muhammad bin Mukarram bin 'ali, *Lisanu al-'Arabi*, Vol. 5, (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri atas tiga huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang bermakna dasar diam atau tenang, sebagai lawan dari berguncang dan bergerak.⁵³

Miskin yaitu orang yang punya harta atau pekerjaan atau keduanya dari harta yang mencukupinya itu kira-kira 50% sampai 90% dari kebutuhannya. maksudnya ini misalkan kebutuhan seharinya itu 10 ribu, tapi harta/ kerjaannya hanya dapat gaji 5-9 ribu saja.

Al-Qur'an menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kemiskinan, antara lain dengan kata faqir, miskin, al-sa'il, dan al-mahrum. tetapi, kata faqir dan miskin lebih sering dijumpai di dalam Al-Qur'an. di dalam al-Qur'an kata faqir dijumpai 12 kali dan kata miskin dijumpai 25 kali, yang masing-masing digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda.⁵⁴ Namun, Al-Qur'an sendiri tidak memberikan definisi yang rinci untuk istilah-istilah tersebut.

Beberapa kosa kata di dalam Al-Qur'an yang biasanya dimaknai dengan miskin mengindikasikan bahwa miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tersebut membutuhkan pertolongan. Dari pernyataan tersebut, miskin dapat dimaknai sebagai kondisi seseorang yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan makan dan minum.

Para ahli mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan. Berikut definisi kemiskinan menurut para ahli:

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, (Jakarta: Aku Bisa), hlm. 48.

⁵⁴ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Menodorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainnya.⁵⁵
- b. Menurut Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵⁶
- c. Menurut John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial
- d. Menurut Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Dilihat dari perspektif sosial, kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung seseorang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitasnya meningkat.

Struktur sosial suatu masyarakat meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga didalam mana orang banyak tadi ikut ambil bagian, lembaga mana dimaksudkan

⁵⁵ Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 10.

⁵⁶ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. x.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai hubungan-hubungan tertentu yang timbul dari aktifitas orang-perorangan atau kelompok yang hendak mencapai tujuan bersama. Struktur sosial baik menyangkut kelompok maupun lembaga tampaknya berdiri pada dasar yang definitive, pada kehidupan masyarakat yang relatif masih sederhana, hal tentang gender, usia, kekerabat, dan kesatuan atas dasar kedaerahan dianggap merupakan dasar-dasar yang paling pokok dari suatu struktur social, namun dalam masyarakat yang lebih modern, satu orientasi manusia dalam mengisi kehidupannya adalah kecenderungan mereka untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupannya, mekanisme yang menunjukkan kecenderungan itu adalah dengan lebih memberdayakan segenap potensi yang dimiliki.⁵⁷

Dapat juga dikatakan bahwa, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

⁵⁷ Syarif Moeis, *Struktur Sosial; Kelompok Dalam Masyarakat*, Bahan Ajar Mata Kuliah Struktur Dan Proses Sosial, (Bandung: Fpips Upi Bandung, 2008), hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Penggunaan tolok ukur yang berbeda-beda dalam menakar kemiskinan, menghasilkan pengertian yang berbeda pula tentang siapa saja yang pantas dikatakan miskin. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemerintah menetapkan suatu standar bahwa yang termasuk golongan miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks keindonesiaan, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah beras. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan beras mereka digolongkan dalam kelompok miskin.⁵⁸

Menurut Sajogyo membedakan standar perolehan beras bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, setiap penduduk masing-masing membutuhkan 20 Kilogram beras per bulan. Sedangkan di perkotaan, setiap penduduk masing-masing membutuhkan 30 Kilogram beras per bulan.⁵⁹ Adanya standar minimum perolehan beras ini berarti

⁵⁸ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 71

⁵⁹ Sajogyo dan Jiwati Sajogyo, *Sosioogi Pedesaan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1983), hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap penduduk yang sudah terpenuhi kebutuhan minimumnya akan beras yakni 20 sampai dengan 30 Kilogram per bulan, tidak lagi dikatakan miskin.

Selain menggunakan tolok ukur terhadap kebutuhan akan beras, pemerintah Indonesia juga menggunakan tolok ukur berdasarkan tingkat pendapatan per waktu kerja dalam satu bulan. Batasan tingkat pendapatan per waktu kerja adalah Rp. 30.000,-per bulan atau lebih rendah.⁶⁰ Seseorang yang berpenghasilan sekian atau kurang dari sekian dalam waktu satu bulan mereka tergolong miskin.

Bank dunia menetapkan mereka yang di sebut sebagai penduduk miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 5 per hari.⁶¹ Jika dikurs-kan dalam rupiah justru rata-rata masyarakat yang paling miskin masih memiliki pendapatan dalam kisaran Rp. 50.000,- per hari. Jika standar ini ditetapkan di Indonesia maka jumlah penduduk miskin akan sangat banyak. Karena itu, Indonesia mempunyai standar tersendiri dalam menggolongkan kelompok miskin.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut tergolong miskin atau tidak.⁶² Tolok ukur ini lebih umum dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan oleh beberapa tokoh di atas. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap orang atau kelompok yang

⁶⁰ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Op. Cit., hlm. xii.

⁶¹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Op. Cit., hlm. 2.

⁶² *Ibid.*, hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai potensi dan sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya maka mereka tidak lagi dikatakan miskin.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.⁶³

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.⁶⁴

Sedangkan pengertian Fakir Miskin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.⁶⁵

Dalam pandangan Islam, kemiskinan (*al-miskin*) atau kefakiran (*al-faqr*) indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap individu perindividu dalam masyarakat (sandang, papan, dan pangan) tidak terpenuhi. Termasuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dan sekalipun yang terakhir ini merupakan tanggung jawab Negara secara langsung.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hlm. 7

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011. Tentang Penanganan Fakir Miskin

⁶⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, *UUD '45 Yang Sudah Di Amandemen Dengan Penjelasan Beserta Susunan Kabinet Kerja 45 Butir-butir Pancasila*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2014-2019), hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosa kata yang berbeda, yaitu *al-maskanat* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-a'ilat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hidup), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tidak berdaya), *al-qani* (kekurangan dan diam), *al-mu'tarr* (yang perlu dibantu), dan *al-dha'if* (lemah). Kesepuluh kosa kata diatas menyandarkan pada satu arti/ makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia.⁶⁶ Kaya atau pun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁶⁷

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

⁶⁶ Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

⁶⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶⁸

Peraturan-peraturan yang terdapat dalam syariat Islam itu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk. Tujuannya itu tidak melampaui salah satu dari tiga perkara ini, kebutuhan pokok, keperluan (biasa) dan kesempurnaan (keperluan *scandary*). Adapun kebutuhan pokok itu artinya ialah yang tidak boleh tidak harus dipenuhi guna mendapatkan kemaslahatan, baik dari segi agama maupun keduniaan, jika hal ini tidak dapat dijamin terlaksananya, maka jalan kehidupan serta kemaslahatan keduniaan itu tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya.

Kehidupan sosial menurut Islam yaitu:⁶⁹

- a. Hak-hak asasi bagi setiap warga Negara.
- b. Undang-undang yang menjamin berlakunya hak-hak itu serta penertiban jalannya.
- c. Undang-undang yang menjamin terwujudnya perlindungan masyarakat.
- d. Pengokoh-pengokoh yang dapat menegakkan terlaksananya undang-undang dan peraturan diatas.

Pada tahun 16 H, bangunan lembaga Baitul Mal pertama, sekaligus sebagai perealisasi salah satu fungsi negara Islam, yakni fungsi jaminan sosial, khalifah Umar Ibn al-Khattab membentuk sistem perealisasi yang menurut pendapat terkuat mulai dipraktekan untuk pertama kalinya pada

⁶⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (1)

⁶⁹ Musthafa Husni Assiba'I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 20 H. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, khalifah Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu salah satunya seperti: Departemen Jaminan Sosial, Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh Fakir Miskin dan orang-orang yang menderita.⁷⁰

Pada masa pemerintahannya, khalifah Umar ibn al-khattab mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi 4 bagian, yaitu:

- a. Pendapatan zakat danu'shr (pajak tanah). Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada delapan asnaf.
- b. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan.
- c. Pendapatan kharaj, pai,jizyah, u'shr (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.
- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Jaminan sosial nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju

⁷⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), hlm. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utama bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2). Secara universal jaminan sosial dijamin oleh pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), di mana Indonesia ikut mendatangkannya. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada perubahan UUD 1945, pasal 34 ayat (2) yaitu Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.⁷¹

Membina nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara ditujukan untuk membina hubungan timbal balik antara rakyat dengan kepala Negara. Langkah-langkah-langkah yang dilakukan meliputi:⁷²

1. Kepala Negara berkewajiban untuk bermusyawarah dengan rakyatnya.
2. Kepala Negara menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran serta tanggung jawab terhadap rakyatnya.
3. Dalam penerapan undang-undang kepala Negara tidak membedakan latar belakang status sosial.

Dan sebaliknya dalam kedudukan sebagai rakyat, kaum muslimin diharuskan untuk menjalankan kewajiban dalam bentuk aktifitas yang mengandung nilai-nilai ajaran Islam, seperti:

⁷¹ Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 111

⁷² Alaluddin, *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menaati peraturan dan taat kepada kepala Negara yang melaksanakan perintah Allah swt.
- b. Menyiapkan diri untuk membela Negara.
- c. Menjauhkan diri dari segala tindakan yang merugikan negara seperti bekerja sama dengan musuh, membuat kerusakan atau mengadakan maker.

Dari 12 kata fakir yang terdapat dalam alquran, terdapat 7 kategori yang terkait dengan hukum.⁷³

- a. Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh bagian dari daging Qurban yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji.
- b. Fakir yang tergolong sebagai orang yang boleh memakan harta anak yatim yang diuruskan dengan cara yang baik dan tidak melampaui batas.
- c. Fakir yang termasuk orang yang boleh menerima sedekah secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi yang lain.
- d. Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh santunan atau bantuan.
- e. Fakir yang termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat.
- f. Fakir yang berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah.
- g. Fakir yang berhak memperoleh pembelaan yang adil ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak disengaja.

Adapun orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut:⁷⁴

⁷³ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Op. Cit.*, hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Orang miskin yang termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari fidyah atau denda orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena uzur.
- b. Orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.
- c. Orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melakukan zihar (perkataan suami terhadap istrinya yang mengandung maksud menyamakan isterinya dengan ibunya sendiri).
- d. Orang miskin yang mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja.
- e. Orang miskin yang mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan ihram.
- f. Orang miskin yang termasuk salah seorang yang boleh menerima harta dari rampasan perang.
- g. Orang miskin yang boleh menerima harta dari zakat.

Menurut Kuncoro, faktor penyebab kemiskinan antara lain :

- a. Faktor struktural secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

⁷⁴ Ibid., hlm. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor kultural kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- c. Faktor struktural kemiskinan muncul juga sebab perbedaan akses dan modal.⁷⁵

Di bawah ini ada pula beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraissyim antara lain:

- a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
- b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
- c. Biaya kehidupan yang tinggi.
- d. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.⁷⁶

Sedangkan menurut Bambang Ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan dengan terpaksa apa yang saat ini dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.⁷⁷

Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

⁷⁵ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), hlm. 107

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

⁷⁷ Bambang Ismawan, *Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: BKKBN, 2003), hlm. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor kultural mencakup 2 macam unsur yaitu biologis dan psikologis. Faktor ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu si miskin itu sendiri. Ketidakmampuan individu dalam melakukan usaha atau berkeaktifitas, menjadikan hidup mereka miskin. Contoh ketidakmampuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Ketidakmampuan secara fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.
 - b. Di bidang intelektual misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi.
 - c. Keterbatasan mental emosional misalnya malas, mudah menyerah, putus asa temperamental.
 - d. Kelemahan spiritual misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin.
 - e. Kondisi sosial psikologis yang kurang mendukung, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi atau stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan.
 - f. Tidak berketerampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja.
 - g. Tidak memiliki asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja.
2. Faktor struktural mencakup 2 macam unsur yaitu kemiskinan dan budaya. Faktor ini adalah faktor yang berasal dari luar diri individu si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin. Bentuk-bentuk pengaruh dari luar diri si miskin antara lain sebagai berikut:

- a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
- b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah.
- c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal.
- d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro.
- e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak.
- f. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti zakat
- g. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
- h. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana.
- i. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material.
- j. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
- k. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

Faktor-faktor tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan individu, baik hubungan individu dengan diri individu itu sendiri, individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok yang dalam hal ini adalah dengan sesama masyarakat, ataupun hubungan individu dengan pemerintah.

Dampak adanya kemiskinan. Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu permasalahan sosial saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan di latarbelakangi oleh motif ekonomi yakni ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Selain maraknya tindak kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk juga merupakan salah satu dampak dari adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan:

- a. Banyaknya pengangguran.
- b. Terciptanya perilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan ketika mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan.
- c. Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
- d. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.⁷⁸

Dampak-dampak yang telah disebutkan secara umum, dapat digeneralisir dalam beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek Kependudukan

Masalah kependudukan, kemiskinan berdampak pada ketidakmerataan pertumbuhan penduduk di setiap wilayah sehingga ketidakmerataan tersebut membawa konsekuensi berat kepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Secara nasional penduduk yang tidak merata membawa akibat bagi penyediaan berbagai sarana dan kebutuhan penduduk. Dalam bidang lapangan pekerjaan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pada akhirnya menimbulkan pengangguran baik secara tersembunyi ataupun pengangguran secara terbuka.

b. Aspek Ekonomi

Masalah Ekonomi menyangkut masalah kerumahtanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi kedalam beberapa aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas penduduk, sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transportasi, kondisi dan lokasi geografi. Ditinjau dari segi kuantitas Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dengan jumlah penduduk yang banyak. Tapi

⁷⁸ Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan menjadikan penduduk tidak memiliki kekuatan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Kemudian kemiskinan menjadikan penduduk seolah menunjukan kelemahannya sebagai konsumen berbagai produksi.

c. Aspek Lingkungan

Masalah lingkungan dapat diartikan bahwa masalah yang terjadi di lingkungan hidup manusia mengancam ketentraman dan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara komponen manusia dengan lingkungan yang menjadi penampung dan penjamin kehidupan manusia. Dampak lainnya yaitu keterbelakangan pembangunan, kebodohan, banjir, pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan yang rendah yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang mendukung karena kemiskinan.

d. Aspek Pendidikan

Masalah pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. Dampak kemiskinan terhadap pendidikan memang sangat merugikan sekali karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum mengenal pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pemberontakan

Masalah pemberontakan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya. Semua itu tidak terlepas dari usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik (sejahtera) dari keadaan kemiskinan yang menyimpannya. Pemberontakan seperti itu biasanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin.⁷⁹

2. Faktor Penyebab Kefakiran

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya Kefakiran/kemiskinan, yaitu:

a. Pendidikan yang terlampau rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan/ keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di atas dia miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini menyangkut mentalitas dan

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 21-30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, atau bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.⁸⁰

c. Keterbatasan sumber alam

Kefakiran/kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya alamiah miskin. Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya: tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.

d. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang/masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, Tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.

⁸⁰ Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 288



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal merupakan sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Beban keluarga

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak meningkat pula tuntutan/beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya dan bersifat laten (tersembunyi).⁸¹

3. Ciri-Ciri Orang Fakir

Kefakiran/kemiskinan, yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh tiga hal: (1) persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, (2) posisi manusia dalam lingkungan sekitar, dan (3) kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi. Persepsi

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat, dan sistem nilai yang dimiliki. Dalam hal ini garis kemiskinan dapat tinggi atau rendah. Terhadap posisi manusia dalam lingkungan sosial, bukan ukuran kebutuhan pokok yang menentukan, melainkan bagaimana posisi pendapatannya ditengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi ditentukan oleh komposisi pangan apakah bernilai gizi cukup dengan nilai protein dan kalori cukup sesuai dengan tingkat umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya.

Kesemuanya dapat tersimpul dalam barang dan jasa serta tertuangkan dalam nilai uang sebagai patokan bagi penetapan pendapatan minimal yang diperlukan, sehingga garis kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan minimal. Menurut Sayogya, garis kemiskinan dinyatakan dalam Rp/tahun, ekuivalen dengan nilai tukar beras.

Atas dasar ukuran ini maka mereka yang hidup di bawah garis Kefakiran/ kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan, dan sebagainya.
- b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
- c. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self employed), berusaha apa saja.
- e. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.

4. Cara Mengatasi Kefakiran

Banyak cara yang bisa dilakukan guna mengatasi masalah Kefakiran/ kemiskinan, di antara cara pemecahan masalah. Kefakiran/ kemiskinan yang paling urgen adalah:

- a. Latihan pendidikan keterampilan

Dengan adanya latihan keterampilan ini diharapkan seseorang/anggota masyarakat mempunyai bekal kemampuan untuk terjun dalam dunia kerja. Upaya peningkatan keterampilan ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu dengan dibentuknya Balai Latihan Keterampilan yang ada di berbagai kota. Misalnya: di Singosari, Malang. Di bidang pendidikan ini diupayakan menghasilkan lulusan yang siap pakai/ terjun ke lapangan kerja. Oleh sebab itu sekolah kejuruan hendaknya dibangun secara besar-besaran.

- b. Berwiraswasta

Modal kemampuan yang berupa keterampilan akan menunjang atau memberi bekal bagi seseorang untuk memperoleh pendapatan yang dapat diterapkan melalui dunia wiraswasta. Karena bagaimanapun juga tidak semua orang, bisa menjadi pegawai negeri, meskipun telah menyelesaikan studinya di suatu pendidikan formal. Jiwa wiraswasta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu ditanamkan sejak anak-anak sehingga kemampuan berusaha ada pada setiap anak atau orang.⁸²

c. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana

Pemasyarakatan program ini sangat diperlukan terutama dalam kaitannya dengan pengendalian jumlah penduduk yang terlampau cepat. Pertumbuhan di bidang ekonomi dapat mempunyai arti kalau dibarengi dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.⁸³

Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia, dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonominya, sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial, apabila perbedaan kedudukan, ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas.⁸⁴

Pada masyarakat yang bersahaja susunan dan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan masalah sosial, karena mereka menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan, sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan

⁸² Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar, Op.Cit.*, hlm. 290.

⁸³ Ruslan H. Prawito, *Penduduk, Teori, Fakta dan Masalah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25,26.

⁸⁴ Said Rusli, *Ilmu Kependudukan*, (Bogor: Pustaka LP3S, 2005), hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita karenanya, Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah, kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.⁸⁵

Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu problema sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan. Tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta seseorang dianggap miskin karena tidak memiliki radio, televisi atau mobil. Sehingga lama kelamaan benda-benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial-ekonomi seseorang, yaitu apakah dia miskin atau kaya. Dengan demikian persoalannya mungkin menjadi lain yaitu tidak adanya pembagian kekayaan yang merata.

B. Anak Terlantar

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸⁶

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁸⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk keadaan sekitarnya”.⁸⁷ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁸⁸

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.⁸⁹ Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.⁹⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁹¹

⁸⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hal. 113

⁸⁸ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

⁸⁹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 5.

⁹⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 1.

⁹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 270.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* menjelaskan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.⁹² Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia, tetapi amal-amal yang kekal karena dilakukan demi karena Allah lagi shaleh, yakni sesuai dengan tuntutan agama dan bermanfaat adalah lebih baik untuk kamu semua pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk menjadi harapan.⁹³

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian.⁹⁴

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁹⁵

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah 'Pesan, Kesan dan Kekerasan Al-Qur'an'*, (Jakarta: Lintera Hati, 2007), hlm. 69.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 70

⁹⁴ MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Cet. I, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), hlm. 6.

⁹⁵ Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.⁹⁶

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.⁹⁷ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹⁸

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan untuk perkembangan masa depannya.

⁹⁶ Anak”, Wikipedia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.

⁹⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) hlm. 5.

⁹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.



2. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.⁹⁹

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Menurut UU No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹⁰⁰

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

⁹⁹ Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Op. Cit., hlm. 1633.

¹⁰⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 212



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.¹⁰¹

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

3. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:

Pertama, mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.

Kedua, anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.

Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.

¹⁰¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 226-227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.

Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah-pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.¹⁰² Selain itu, anak juga dapat dikatakan terlantar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Anak terlantar tanpa orang tua/ keluarga dengan ciri-ciri:
 - 1) Orang tua/keluarga tidak diketahui
 - 2) Putus hubungan dengan orang tua/keluarga
 - 3) Tidak memiliki tempat tinggal
- b. Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
 - 1) Hubungan dengan orang tua masih ada
 - 2) Tinggal bersama orang tua/keluarganya
 - 3) Rawan sosial dan putus sekolah
 - 4) Tinggal dengan keluarga miskin

Menurut keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia berdasarkan pengertian anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 230.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Anak berusia 5-18 tahun.
- 2) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu.
- 3) Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit.
- 4) Salah seorang atau kedua-duanya meninggal.
- 5) Keluarga tidak harmonis.
- 6) Tidak ada pengasuh/pengampu.
- 7) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.¹⁰³

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:

- 1) Anak terlantar berusia 5-18 tahun.
- 2) Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih sayang, perlakuan yang baik dan tidak disekolahkan oleh orang tuanya.
- 3) Tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua asuh/keluarga asuh.
- 4) Berasal dari keluarga miskin atau broken home.
- 5) Tidak terpenuhi hak-hak anak.
- 6) Anak yang bekerja/mencari nafkah atau anak yang menghabiskan waktunya bermain di jalanan atau tempat-tempat umum.

4. Konsep Perlindungan Anak

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan

¹⁰³ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota, Bab I hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjagaan (perlindungan) untuk dirinya.¹⁰⁴ Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰⁵

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*, Cet. I, (Jakarta Timur: Istanbul, 2016), hlm. 183.

¹⁰⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. II, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 33

¹⁰⁶ Mohammad Taufik Makarao, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan kualitas hidup manusia dalam pembangunan nasional suatu negara yaitu bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap rakyatnya terutama perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.¹⁰⁷

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum sivil.

¹⁰⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/ remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan menguasai pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasiya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁰⁹

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi

¹⁰⁸ Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 21.

¹⁰⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. II, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.¹¹⁰

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:¹¹¹

a. Luas Lingkup Perlindungan:

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan:

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

¹¹¹ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini berasaskan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.¹¹²

5. Konsep Kesejahteraan Anak

a. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.¹¹³ Kesejahteraan Sosial menurut Sumarnonugroho adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu fungsi terorganisasi adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi.¹¹⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang

¹¹² Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 141.

¹¹³ Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2005), hlm. 16

¹¹⁴ Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Pengertian kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna, yaitu¹¹⁵:

- 1) Sebagai kondisi sejahtera. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materil dan non materil. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi.
- 2) Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal.
- 3) Sebagai tunjangan sosial, diberikan kepada orang yang tidak mampu, karena sebagian besar penerima manfaat adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur. Keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, dan ketergantungan.
- 4) Sebagai proses atau usaha terencana. Yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah

¹¹⁵ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.

b. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 pasal 1 angka (1) bagian (a) yang dimaksud Kesejahteraan Anak adalah “Suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.¹¹⁷

Dalam konsep kesejahteraan sosial anak, dibutuhkan program dan pelayanan yang baik. Dimana Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/ subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.¹¹⁸ Selain itu, Program Kesejahteraan Sosial

¹¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 28

¹¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 1 bagian (a).

¹¹⁸ Mohammad Taufik Makarao, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Op. Cit., hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak (PKSA) merupakan wahana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga.

Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Salah satu tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu distribusi dan tepat manfaat.¹¹⁹

Pelayanan kesejahteraan anak adalah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi, sistematis, dan profesionalis terhadap anak terlantar yang memungkinkan terpenuhinya hak anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.¹²⁰ Pelayanan kesejahteraan anak dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial menggunakan salah satu dari teori pekerja sosial, yaitu teori sistem.

Teori sistem adalah salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan permasalahan dan membuat rencana kegiatan atau treatment. Dengan cara ini pekerja sosial dapat berupaya untuk memahami kepentingan relatif dari beragam kepentingan dalam

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

¹²⁰ Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, (Pekanbaru: Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, 2013), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan klien. Sebagai suatu cara untuk pengembangan permasalahan yang ada, pekerja sosial dapat mengkonseptualisasi masalah-masalah dengan peristilahan sistem klien, agen perubahan, kegiatan, dan sistem sasaran, dalam rangka menentukan tujuan melalui upaya perubahan terencana.¹²¹

Teori sistem merupakan teori yang menganggap bahwa pekerja sosial merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan sosial kepada individu dan masyarakat. Pekerja sosial berupaya untuk memenuhi kebutuhan individual serta meningkatkan pelayanan-pelayanan sosial tempatnya berada, sehingga dengan demikian pekerja sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial dapat bekerja dengan lebih efektif.

Teori sistem merupakan teori yang membedakan antara praktik pekerja sosial dengan profesi penolong lainnya. Hal ini karena pekerja sosial sangat memberikan perhatian dan memperhatikan pengaruh lingkungan sekitar klien ketika melakukan intervensi dan penyelesaian masalah.¹²² Teori ini berupaya untuk mengubah masyarakat agar bersifat lebih adil atau menciptakan pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial personal melalui pertumbuhan individu maupun masyarakat dianggap sebagai gagasan utama dalam pandangan ini.

¹²¹ Pipit Febrianti, *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 51.

¹²² Siti Napsiyah dan Lisna Diawati Fuaid, *Belajar Teori Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis Pincus dan Minahan menyatakan terdapat empat sistem dasar dalam praktek pekerjaan sosial, yaitu:¹²³

- 1) Sistem pelaksana perubahan, pekerja sosial yang secara khusus bekerja untuk menciptakan perubahan secara terencana.
- 2) Sistem klien, adalah sekelompok orang yang sepakat meminta pelayanan kepada pekerja sosial dan telah memberikan kewenangan menjadi penerima pelayanan berdasarkan kesepakatan atau kontrak dengan pekerja sosial.
- 3) Sistem sasaran, yaitu sekelompok orang, badan-badan, dan atau organisasi yang dijadikan sasaran perubahan atau dijadikan media yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan pertolongan dan para penerima pelayanan utama memperoleh manfaat yang diharapkan.
- 4) Sistem aksi atau kegiatan, istilah ini dipakai untuk menggambarkan dengan siapa saja pekerja sosial bekerja dalam upayanya memenuhi tugasnya dan mencapai tujuan perubahan yang diharapkan.

Teori sistem juga membantu untuk menciptakan fokus yang menghadirkan komunikasi di antara penghuni dalam lembaga atau panti, baik sebagai cara untuk menjelaskan permasalahan dalam situasi tersebut atau sebagai cara untuk mengintervensi.¹²⁴

¹²³ *Ibid.*, hlm. hlm. 66.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 71.



6. Konsep Pemeliharaan Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.¹²⁵ Sebagaimana hubungan pemerintah dan orang tua terhadap anak-anak.

Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakikat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah swt. kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar. Oleh karena itu, seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan rasa penjagaan, cinta kasih, dan keikhlasan.¹²⁶

Dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah. Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Menurut ulama fiqh mendefenisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari

¹²⁵ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam*, Cet. XX, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 62

¹²⁶ Abdullah Nashih Ulwan. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Cet. I, (Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015), hlm. 99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik, jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹²⁷ Dalam arti yang lebih luas hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya hubungan perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadist Nabi yaitu:

ان امرأة قال يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء وحجري له حواء وإن اباه طلقني واراد ان يذ ز عه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم احق به ما لم تتكحى

Artinya:

Bahwa seorang wanita berkata. “Wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah sumber minumannya, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku”. Rasulullah bersabda kepadanya, “Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah”. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh al Hakim).¹²⁸

Diminta atau tidak diminta, pemeliharaan (perlindungan) terhadap anak adalah hak anak. Maulana Hasan Wadang menerangkan bahwa hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sebagai berikut:¹²⁹

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya.
- c. Hak anak dalam penerimaan nama baik.

¹²⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 114.

¹²⁸ Al-Hafizh Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 625.

¹²⁹ Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grassindo, 2000), hlm. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam memiliki harta benda, (hak waris), demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir batin.¹³⁰ Keberpihakan Islam ini bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa termasuk anak terlantar, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

C. Konsep *Maqâshid Al-Syarî'ah*

1. Pengertian *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Maqâshid al-syarî'ah menurut etimologi *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* merupakan

¹³⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Cipta Karya, 2000), hlm. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk jama' dari *maqshad* yang berasal kata *قصد - يقصد - قصدا - ومقصدا*¹³¹ yang berarti *ityan al-syai'* (mendatangkan sesuatu), *tawajjuh* (mengarah), *istiqamah al-thariq* (jalan yang lurus) *al-adlu* atau *al-tawassuth* (seimbang).¹³² Kata syari'ah secara berarti *al-din* (agama) *al-thariqah* (jalan) dalam bahasa Arab biasa diartikan dengan jalan menuju sumber air. Menurut Ibnu Taimiyah secara istilah syari'ah berarti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah baik berupa akidah ataupun amaliah.¹³³

Adapun pengertian *masqâshid al-syarî'ah* secara terminologi beragam oleh para ulama. Muhammad Thahir bin Asyur (W. 1393 H) beliau mengatakan bahwa *maqâshid tasyri' ammah* adalah makna-makna hukum yang diisyaratkan oleh syara' di setiap kondisi penetapan hukum atau pada umumnya dengan tidak mengkhususkan perhatiannya pada bentuk khusus.¹³⁴ Allal al-Fasi (W. 1974 M) mengatakan bahwa *masqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia yang ditetapkan oleh syara' pada setiap hukum.¹³⁵ Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *masqâshid al-syarî'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang terdapat di setiap hukum.¹³⁶ Ahmad Raisuni mengatakan bahwa *masqâshid al-syarî'ah* adalah

¹³¹ Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughah*, Juz. 4, (Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1960), hlm. 576.

¹³² Khalil Bin Ahmad Al-Farahidiy, *Kitab al-Ain*, Juz. 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 54.

¹³³ Abd al-Rahman bin Abd al-Qasim, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, Juz. 19, (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd Li Thiba' at al-Mushaf al-Syarif, 2004), hlm. 306.

¹³⁴ Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Basha'ir liintajy ilmy, 1988), hlm. 171.

¹³⁵ Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah wa Makarimuhu*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy, 1993), hlm. 7.

¹³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia.¹³⁷ Nuruddin bin Muchtar al-Khadimi mengatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah makna-makna yang termuat dalam hukum, baik berupa hikmah-hikmah yang bersifat *juz'i* ataupun *kulliy* yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama yaitu kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.¹³⁸

Dari definisi-definisi di atas terlihat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* mempunyai pengertian, orientasi dan tujuan yang sama, walaupun dengan bahasa yang berbeda yaitu *tahqîq al-maslahah li al-nâs* (mewujudkan kemaslahatan manusia) dengan *jalb al-manfa'ah* (mengambil manfaat) dan *daf al-mafsadah* (menghindari kerusakan).

Menurut al-Ghazali (W. 505 H) masalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, masalah ialah memelihara tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah.¹³⁹

Maslahah yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sepenuhnya diatur dan didasarkan pada perintah dan batasan-batasan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, sama sekali tidak merujuk pada syahwat manusia. Oleh karena itu, bisa jadi aturan yang ditetapkan syara' terasa sangat

¹³⁷ Ahmad Raysuni, *Nazhariyyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'iyah Li Al-Dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tawzi', 1995), hlm. 19

¹³⁸ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidy*, (Qatar: Wizarat al-Awqaf wa Syuun al-Diniyah, 1998), hlm. 52.

¹³⁹ Al-Ghozali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, (Beirut: Al-Risalah, 1997), hlm. 416.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberatkan manusia, bertentangan dengan kebiasaan mereka atau di luar batas kondisi sosial mereka.¹⁴⁰

Tidak semua persoalan disebutkan secara detil dan rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagian besar persoalan seperti “diserahkan” kepada manusia untuk memilih dan menentukan yang terbaik (masalah) bagi mereka. Sehubungan dengan pengakuan atau penyebutan syara' terhadapnya, masalah itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan yang secara jelas diakui sebagai masalah oleh syara' (*masalah mu'tabarah*). Terhadap kemaslahatan seperti ini, tak ada beda pendapat bahwa ia harus diakui sebagai masalah dan harus diikuti. *Kedua*, sesuatu yang secara jelas disebutkan bukan sebagai masalah oleh syara' (*masalah mulghah*). Kemaslahatan seperti ini juga tidak diperdebatkan bahwa ia harus ditinggalkan. *Ketiga*, suatu keadaan yang secara tegas tidak disebutkan, akan tetapi juga tidak dibatalkan, sebagai kemaslahatan dalam nash (*masalah mursalah*).¹⁴¹

2. Dasar Hukum *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Pada dasarnya *maqâshid al-syarî'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqâshid al-syarî'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syariatkan Tuhan terhadap manusia.

¹⁴⁰ Ibrahim bin Musa al-Khumiy al-Gharhithiy al-Malikiy (as-Syathiby), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 172

¹⁴¹ Muhammad bin Umar bin al-Husayn al-Raziy (al-Raziy), *al-Mahshul*, Juz. 6, (Riyad: Jami'ah al Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, 1400 H), hlm. 219-220.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penekanan *masqâshid al-syarî'ah* yang dilakukan oleh al-Shatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.¹⁴²

Ayat-ayat itu antara lain adalah berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya:
(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁴³

Berkaitan dengan asal penciptaan, Allah berfirman dalam surat Huud ayat 7:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

Artinya:
Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya,¹⁴⁴ dan jika kamu Berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati",

¹⁴² Al-Shatibi, *Al-Muwaffaqad fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Mustafa Muhammad Syalaby, t.th), hlm. 6-7.

¹⁴³ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 95.

¹⁴⁴ Maksudnya: Allah menjadikan langit dan bumi untuk tempat berdiam makhluk-Nya serta tempat berusaha dan beramal, agar nyata di antara mereka siapa yang taat dan patuh kepada Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini¹⁴⁵ tidak lain hanyalah sihir yang nyata".¹⁴⁶

Dalam ayat lain Al-Qur'an surat Al-Zariyyat ayat 56, Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁴⁷

Menurut al-Shatibi, dalam hubungannya dengan hukum terdapat cukup banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya dapat dihubungkan dengan masalah:

- a. Wudhu'. Setelah Tuhan berbicara tentang wudhu', ia kemudian berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹⁴⁸

- b. Shalat. Berkenaan dengan shalat, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45:

¹⁴⁵ Maksud mereka mengatakan bahwa kebangkitan nanti sama dengan sihir ialah kebangkitan itu tidak ada sebagaimana sihir itu adalah khayalan belaka. menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan kata Ini ialah Al Quran ada pula yang menafsirkan dengan hari kebangkit.

¹⁴⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 201.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 472.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 98-99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٤٩﴾

Artinya:

Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴⁹

- c. Jihad. Ayat yang menjelaskan masalah jihad ini adalah firman Allah surat

Al-Hajj ayat 39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿١٥٠﴾

Artinya:

Telah di izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.¹⁵⁰

- d. Qisas. Firman Allah dalam kaitan *qisas* terdapat dalam surat Al-Baqarah

ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹⁵¹

Paparan ayat-ayat di atas, dapat dipahami dari pandangan al-Shatibi

bahwa *maqâshid al-syarî'ah* dalam arti kemaslahatan mengandung berbagai aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 323.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 304.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 26.



permasalahan-permasalahan hukum yang telah ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dapat dianalisis melalui *maqâshid al-syarî'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama islam.

3. Pembagian *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Dari segi muatan masalah yang harus dipelihara, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi tiga yaitu:

a. Pembagian *Maqâshid Al-Syarî'ah* Dari Segi Masalah Yang Harus Dipelihara.

1) *Maslahah Dharuriyah*¹⁵²

Maslahah dharuriyah adalah masalah yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan manusia dan seandainya tidak ada maka kemaslahatan manusia tidak akan terwujud.¹⁵³ Kemaslahatan dharuriyah dapat diketahui dengan mempelajari secara menyeluruh semua ketentuan syara'. Biasanya dibatasi dengan lima persoalan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Lima hal terakhir inilah yang disebut dengan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syara').

Memelihara lima dasar ini terlihat pada beberapa penetapan hukum, diantaranya:

¹⁵² Dharurah secara bahasa berarti *al-Hajat al-Syadidah* (sesuatu yang sangat dibutuhkan). Baca Majma al-Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), Juz 1., hlm. 538. Adapun secara dharurah adalah sampainya manusia pada batasan yang menyebabkan kebinasaan. Lihat Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hlm. 85.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dalam memelihara agama disyariatkan membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat.
- 2) Dalam memelihara jiwa disyari'atkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.
- 3) Dalam memelihara akal disyari'atkan kewajiban had karena minum-minuman keras, karena dengan sanksi ini akan terpelihara, dimana akal merupakan dasar pen-taklifan.
- 4) Dalam memelihara keturunan disyari'atkan kewajiban had karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara.
- 5) Dalam memelihara harta disyari'atkan memberi hukuman potong tangan kepada para penjarah dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara.¹⁵⁴

Legalitas pemeliharaan masalah dharuriyah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151-152.

¹⁵⁴ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, (Beirut: Al-Risalah, 1997), hlm. 417



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي ۚ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

Terjemah (151) Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.¹⁵⁵ Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan terjemah ayat (152) Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu),¹⁵⁶ dan penuhilah janji Allah,¹⁵⁷ yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

¹⁵⁶ Maksudnya mengatakan yang Sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri.

¹⁵⁷ Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

¹⁵⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 134-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan *Pertama*, paling utama adalah janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, sesuatu dan sedikit persekutuanpun. *Kedua*, penyebab dari segala sebab wujud, dan sumber segala nikmat, disebutkannya penyebab perantara yang berperan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib disyukuri, yakni ibu bapak, karena itu disusulkan dan dirangkaikannya perintah pertama itu dengan perintah ini, dalam makna larangan mendurhakai mereka.¹⁵⁹ *Ketiga*, setelah menyebutkan sebab perantara keberadaan manusia di pentas bumi, dilanjutkan-Nya dengan pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan itu yakni, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi kamilah sumbernya.

Keempat, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, seperti membunuh dan berzina baik yang Nampak di antaranya, yakni kamu lakukan secara terang-terangan, maupun yang tersembunyi, seperti memiliki pasangan “simpanan” tanpa diikat oleh akad nikah yang sah. *Kelima*, disebutkan secara khusus satu contoh yang amat buruk dari kekejian itu, yakni, dan ingat kamu membunuh

¹⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah 'Pesan, Kesan dan Kekerasan Al-Qur'an'*, Op. Cit., hlm. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa yang memang diharamkan Allah membunuhnya kecuali berdasarkan sebab yang benar, yakni berdasarkan ketetapan hukum yang jelas.¹⁶⁰

Keenam, dan janganlah kamu dekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia, yakni anak yatim itu mempunyai kedewasaannya dan menerima dari kamu harta untuk mereka kelola sendiri. *Ketujuh*, yakni dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bil al-qish, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan ditimbang untuknya merasa senang, dan tidak dirugikan.¹⁶¹

Kedelapan, dan atas kamu menyangkut apabila kamu berucap, maka berlaku adil. Ucapan, terdiri dari tiga kemungkinan, (1) benar, dan ini bisa saja bermakna positif atau negatif serius atau canda. (2) salah dan ini ada juga yang disengaja (bohong) ada juga yang tidak disengaja (keliru) (3) omong kosong adalah yang tidak dimengerti atau dimengerti tapi tidak berfaidah. Ini paling sedikit merugikan waktu pengucap dan pendengarnya, maka ucapan semacam ini tidak dibenarkan. Bukan Rasul saw mencegah siapa pun menegur seseorang yang berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah Jum'at, padahal kandungan teguran itu adalah benar? Ini dicegah, bukan karena ia

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 339.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 344-345.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak benar, tetapi karena diucapkan secara tidak adil, yakni bukan pada tempatnya.¹⁶² *Kesembilahn*, yaitu perintah memenuhi Allah atau janji Allah. Rangkaian kedua kata ini dapat berarti apa yang ditetapkan oleh Allah perjanjian, yang dalam hal ini adalah syariat agama, bisa juga dalam arti apa yang kamu telah janjikan kepada Allah untuk melakukannya dan yang telah kamu akui, atau bisa jadi juga ia berarti perjanjian yang Allah perintahkan untuk dipelihara dan dipenuhi.¹⁶³

2) *Maslahah Hajiah*

Maslahah hajiah adalah masalah yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kemudahan dan menghindari kesulitan dan kalau seandainya tidak terwujud akan menyebabkan munculnya kesulitan.¹⁶⁴ Di antara bentuk masalah hajiah adalah seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas *dharurah* (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafaah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.

Dalam ibadah wujud masalah hajiah terlihat pada beberapa pensyari'atan, di antaranya qashar dan jama' shalat bagi musafir,

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 347.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 348.

¹⁶⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqad fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Mustafa Muhammad Syalaby, t.th), hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bolehnya berbuka bagi orang sakit dan musafir, boleh shalat duduk bagi orang yang tidak sanggup berdiri, tidak adanya kewajiban bagi orang nifas dan haid untuk shalat dan lain-lain.¹⁶⁵ Dalam muamalah wujud *masalahah hajiah* terlihat pada penyari'atan kebolehan transaksi-transaksi guna mewujudkan kebutuhan manusia berupa jual beli, sewa, syirkah, bolehnya bercerai, bolehnya wali menikahkan anaknya yang masih belia untuk memastikan *kafa'ah* dan lain-lain sebagainya.¹⁶⁶

Pemeliharaan *masalahah hajiah* disebutkan dalam nash, diantaranya surat Al-Ma'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata

¹⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 312



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit¹⁶⁷ atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh¹⁶⁸ perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹⁶⁹

3) Masalahah Tahsiniyah

Masalahah tahsiniyah adalah masalah yang tidak sampai pada tingkat *dharuri* dan *hajiah* namun hanya pada *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.¹⁷⁰ Masalahah *tahsiniyah* tidak berimplikasi kepada munculnya kesulitan bagi manusia.¹⁷¹ Al-Razi mengatakan bahwa *masalahah tahsiniyah* merupakan pengakuan manusia terhadap akhlak yang baik.¹⁷²

Dalam ibadah wujud masalahah *tahsiniyah* terlihat pada beberapa pensyari'atan, di antaranya bersuci dan menutup aurat dalam shalat, memakai pakaian yang bagus ketika pergi ke masjid dan pertemuan. Dalam wujud masalahah *tahsiniyah* terlihat pada larangan

¹⁶⁷ Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

¹⁶⁸ Artinya: menyentuh. menurut Jumhur ialah: menyentuh sedang sebagian Mufasssirin ialah: menyetubuhi.

¹⁶⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 98-99.

¹⁷⁰ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, (Beirut: Al-Risalah, 1997), hlm. 252

¹⁷¹ Nur al-Din bin Muktar Al-Khadimi, *Ilm al-Maqashid al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), hlm. 72.

¹⁷² Abu Bakr Ahmad Al-Razi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 222.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli benda najis atau berbahaya, larangan membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain dan sebagainya.¹⁷³

b. Pembagian *Maqâshid Al-Syarî'ah* Dari Segi Tingkatan *Maqâshid* Yang Ada.

1) *Maqâshid Ashliyyah*

Maqâshid Ashliyyah adalah *maqâshid* yang tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. *Maqâshid Ashliyyah* terbagi kepada *dharuriyah 'ainiyah* dan *dharuriyah kifa-iyah*.¹⁷⁴ Adapun *dharuriyah 'ainiyah*, adalah kewajiban setiap orang mukallaf, sedangkan *dharuriyah kifa-iyah* adalah kewajiban-kewajiban kolektif.¹⁷⁵

2) *Maqâshid Tabî'ah*

Maqâshid tabî'ah adalah *maqâshid* yang di dalamnya terdapat porsi keterlibatan orang mukallaf. Dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan, yang bersifat kebutuhan manusia, dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah, urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. ini semua dengan sebab pemberian Allah yang Maha Bijaksana. Dia menciptakan untuk manusia keinginan untuk makan, minum, seks, keadaan panas, dingin, sehingga manusia perlu berusaha untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perempuan dan

313. ¹⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm.

¹⁷⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqad fi Ushul al-Syariah*, Op. Cit., hlm. 177.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumahan yang layak untuk mempertahankan hidupnya untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Karena Allah juga menciptakan surga dan negara, dikirim Rasulnya untuk menyampaikan bahwa tempat abadi bukanlah dunia ini, tetapi ada akhirat yang harus dipertanggungjawabkan, yang dapat membuat seseorang bahagia atau celaka-celaka selama-lamanya. Karena itu, *maqâshid tabî'ah* adalah pelengkap untuk *maqâshid ashliyyah*.¹⁷⁶

c. Pembagian *Maqâshid Al-Syari'ah* Dari Segi Kandungan *Maqâshid*.

1) *Maqâshid Ammah*

Maqâshid ammah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asyur adalah makna-makna dan himah-hikmah yang diisyaratkan oleh syarak di setiap kondisi tasyri' (penetapan hukum) atau pada umumnya dengan tidak mengkhususkannya pada bentuk khusus dari hukum-hukum syari'ah.¹⁷⁷ pemeliharaan masalah *dharuriyah al-khamsah* merupakan *maqâshid ammah* yang harus dipelihara dalam semua kondisi penetapan hukum secara umum. *Maqâshid ammah* sangat banyak namun yang paling utama adalah *jalb al-mashalih wa dar al-mufasid* (mengambil manfaat dan menghindari kerusakan) bahkan merupakan tujuan utama.¹⁷⁸ *Maqâshid ammah* lainnya adalah

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁷⁷ Ibnu Asyur, *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹⁷⁸ Muhammad Sa'ad bin Sa'id al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-aqatuha bi al-Adillah al-Syari'ah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah Li al-Nasyr wa al-Tawzi, 1998), hlm. 389.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raf al-haraj (menghilangkan kesulitan), *al-adl* (adil), *al-ijtima'* (persatuan) dan lain-lain.

2) Maqashid Khashshah

Maqâshid Khashshah adalah makna-makna dan tujuan yang terdapat pada bab tertentu dari beberapa bab syari'ah seperti *maqâshid al-ibadat*, *maqâshid al-muamalat*, *maqâshid al-jinayat*, dan lain sebagainya.¹⁷⁹ Menurut Ibnu Asyur menyebutkan bahwa *maqâshid khashshah* adalah seperti maqashid tentang keluarga, *maqâshid* tentang transaksi keuangan, *maqâshid* tentang peradilan dan *maqâshid* kesaksian, *maqâshid* tentang pidana dan lain sebagainya.¹⁸⁰

3) Maqâshid Juz'iyah

Maqâshid Juz'iyah adalah maqashid khusus untuk satu masalah saja seperti *maqâshid wudhu'*, *maqâshid shalat*, *maqâshid* jual beli dan sebagainya. *Maqâshid juz'iyah* terlihat dalam kitab-kitab fikih dan syarah hadis, menurut penulis yang paling utama dalam menulis *maqâshid juzi'yah* adalah Ibnu Taimiyah dan murid Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah.¹⁸¹

D. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Pentingnya penelitian yang relevan adalah untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh terkait dengan permasalahan

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 411

¹⁸⁰ Ibnu Asyur, *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹⁸¹ Musfir Bin Ali Al-Qathaniy, *Manhaj Istinbath Al-Ahkam Al-Nawazil Al-Fikhiyah Al-Mu'ashirah*, (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadhra', 2003), hlm. 550.



Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syari'ah*.

Adapun mengenai originalitas sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Andi Rina Pitrida, dengan judul: Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa).¹⁸² Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yuridis normatif (hukum positif) dan yuridis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Sosial Kabupaten Gowa, masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Gowa, anak terlantar atau wali anak terlantar yang ada di sekitar Kabupaten Gowa, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan perundang-undangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Berdasarkan pasal 34 UUD 1945. Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah melakukan beberapa upaya untuk menangani anak terlantar seperti melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke LKSA, dan melakukan pendampingan anak

¹⁸²Rina Pitrida, *Kewajiban Nafkah Dan Hadhanah Terhadap Anak Piatu Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156*, Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlantar. Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan belum efektif. Bahwa pada tahun 2016 sebanyak 2.066 anak masih terlantar dikarenakan beberapa panti asuhan tutup, kurangnya anggaran dana, kurangnya pekerja sosial dan kurangnya pendekatan awal pada saat pendataan.

Letak Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama membahas Pasal 34 UUD Tahun 1945 akan tetapi mereka lebih menekankan pada Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa). Adapun perbedaannya adalah akar penelitian ini fokus pada Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Alfin Qodri Azazi, dengan judul: *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.¹⁸³
Fokus penelitian Bagaimana ketentuan hukum kewajiban nafkah anak menurut perspektif fiqh dan perundang-undangan di Indonesia, dan Nilai-nilai filosofi apa sajakah yang terkandung pada aturan nafkah anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (kepuustakaan). Dari hasil penelusuran sumber pustaka, yakni Undang-undang, kitab fiqh, buku-buku, makalah, jurnal dan lain sebagainya. Penelitian bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* aturan yuridis nafkah anak yang ada pada hukum keluarga Islam di Indonesia menyimpan nilai-

¹⁸³ Alfin Qodri Azazi, dengan judul: *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai aksiologi hukum yang bermanfaat untuk menumbuh-kembangkan kehidupan social masyarakat yang sejahtera. Sebab, dengan terpenuhinya hak nafkah anak, berarti juga anak-anak telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*), seperti kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual anak, sehingga anak-anak siap menjadi manusia yang berkualitas di masa depan. *Kedua* pemenuhan nafkah anak, juga syarat dengan nilai-nilai keadilan, seperti keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender, yaitu semua sangat penting untuk selalu dijaga dan dikelola dalam tata kehidupan bermasyarakat. *Ketiga* adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar kewajiban nafkah anak dalam perundang-undangan lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya penegakan hukum dan kontrol sosial.

Letak Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama membahas nafkah anak akan tetapi mereka lebih menekankan pada jaminan hak nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah akar penelitian ini fokus pada Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Nihlatus Shoimah, dengan judul: Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).¹⁸⁴ Fokus penelitian Bagaimana alasan ilmiah penetapan usia *mumayyiz* 12 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam. Implikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *hadhanah*. Analisis hukum menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang belum *mumayyiz* menentukan *hadhanah* atas pilihannya kepada ayah kandung. Adapun jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum *normatif* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Bahkan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berbentuk buku maupun jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak usia 6 tahun yang dalam segi perkembangan pola pikir telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan buruk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum diberikan haknya untuk memilih ayah atau ibunya sebagai orang tuda asuh. Tetapi dalam pandangan hukum Islam anak usia 6 tahun yang telah cakap terhadap apa yang terjadi disekelilingnya, telah memahami *khitab* Allah, maka anak tersebut dapat dikatakan telah *mumayyiz* sehingga anak tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun pilihannya ditujukan kepada ayah,

¹⁸⁴ Nihlatus Shoimah, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Tesis, (Malang: Universitas Islam Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ayahnya memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dan ibu tidak memenuhi syarat-syarat hadhanah.

Letak Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama membahas hak hadhanah anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung. Adapun perbedaannya adalah akar penelitian ini fokus pada Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Triyani Kathrilda Ambat, dengan judul Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸⁵ Hasil penelitian menyebutkan bahwa, *Pertama* Secara legal formal, fungsi negara terhadap memelihara anak-anak terlantar serta kepedulian terhadap masa depan mereka telah ada dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Dalam pelaksanaannya perundang-undangan mengatur berbagai program-program kebijakan dalam mengatasi permasalahan sosial termasuk anak-anak terlantar. *Kedua*, Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak terlantar yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Di Indonesia dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga, pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan,

¹⁸⁵ Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Jurnal Lex Administratum), Vol. I/ No. 2/ Januari-Maret/ 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan.

5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Yohanes Suhardin, dengan judul Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum.¹⁸⁶ Hasil penelitian menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare slale*) sebagaimana telah tersurat dalam pembukaan UUD 1945 akan terwujud jika negara berperan aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya". Negara memberlakukan kebijakan *publik* termasuk hal dalam berupa penganugerahan hak-hak sosial" (*the granting of social rights*) kepada warga negara. Pengorganisasian perekonomian di lingkungan oleh peraturan perundang-undangan yang di jiwai semangat cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945 dan terutama Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Bersamaan dengan itu, segera menyelesaikan faktor-faktor yang melingkupi masalah kemiskinan, seperti cara pandang terhadap masalah kemiskinan dan budaya yang justru melanggengkan kemiskinan itu.
6. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Imam Sukadi, dengan judul Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah

¹⁸⁶ Yohanes Suhardin, *Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan) Tahun ke-40 No. 3 Juli-September 2010. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Bidang Perlindungan Hak Anak.¹⁸⁷ Hasil penelitian menyebutkan Kurang nya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep *good governance* dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-Hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak telantar, diantaranya adalah pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak, Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pernerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

7. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Irwan Sandi, dengan judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.¹⁸⁸ Hasil penelitian menyebutkan bahwa tujuan

¹⁸⁷ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijawa.

¹⁸⁸ Irwan Sandi, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*. e-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei (2016), ISSN:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dibuktikan dengan mengacu pada teori Van Meter Van Horn dengan 6 (enam) indikator keberhasilan implementasi yang meliputi: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (disposisi) agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya berhasil.

8. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Subaidi, dengan judul Konsep Nafkah Menurut Perkawinan Islam.¹⁸⁹ Hasil penelitian menyebutkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah di mana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material duniawi, tetapi juga pertimbangan kehidupan.

9. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Faryadi A. Tjitji, dengan judul Implementasi Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam

2302-2019. Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako.

¹⁸⁹ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*. Jurnal *Isti'dal* (Jurnal Studi Hukum Islam). Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. LP. Ma'arif NU Kabupaten Jepara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan Anak Terlantar Di Kota Ternate.¹⁹⁰ Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemerintah kota ternate melalui Dinas Sosial Kota Ternate dalam menjalankan amanat konstitusi lewat pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan setiap tahunnya namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial Kota Ternate dalam proram pemeliharaan anak terlantar di Kota Ternate masih terdapat kekurangan karena tidak tersedianya sarana pendidikan seperti sekolah non formal sehingga anakanak terlantar ini pun dapat meperoleh pendidikan sebagaimana hak mereka sebagai seorang anak untuk meningkatkan sumber daya manusianya dan mengangkat harkat dan martabat sebagai seorang anak.

Dari berbagai penelitian maupun tulisan yang disebutkan di atas, umumnya para peneliti membahas konsep anak terlantar dan secara umum. Hal ini memberikan peluang bagi peneliti setelahnya untuk mendalami persoalan tersebut, dan peluang inilah yang berusaha diambil oleh penulis. Penelitian yang dilakukan penulis tidak sekedar mendiskripsikan tentang Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

¹⁹⁰ Faryadi A. Tjitji, *Implementasi Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kota Ternate*. Jurnal Ilmu Hukum, (2018), Ternate: Universitas Khairun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dalam arti data-data diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian penulis mendiskripsikan dalam bentuk kualitatif artinya dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk kuantitatif yaitu bukan dengan presentasi.¹⁹¹

B. Tempat Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Riau yaitu terletak di Jln. Jend Sudirman No. 239 Telp (0761) 21593 Fax. (0761) 37690.

¹⁹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3



C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.¹⁹²

Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif,¹⁹³ berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁹⁴ Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah *normatif-yuridis*¹⁹⁵ yaitu:

- a. Normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan kepada Al-Quran, Hadist dan kitab-kitab fiqh dan yang lainnya.
- b. Yuridis yaitu pendekatan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, Sumber data¹⁹⁶ dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹⁷ Dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata,

¹⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

¹⁹³ Data deskriptif, penelitian kualitatif adalah deskriptif data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Lihat Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3.

¹⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Op. Cit.*, hlm. 4

¹⁹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

¹⁹⁶ Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Lihat Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

¹⁹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Op. Cit.*, hlm. 129.



sesuatu yang abstrak, peristiwa/ gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif,¹⁹⁸ dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber, yaitu :

1. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu: para pegawai di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Riau dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang kedua yaitu Al-Qur'an, Hadits, jurnal-jurnal, kamus, ensiklopedi, dan buku-buku yang berkaitan dengan data tersebut diatas merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dapat dikorelasikan dengan sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.¹⁹⁹ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰⁰ Pengumpulan data melalui dengan jalan pengamatan di

¹⁹⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. 3, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 44.

¹⁹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Office: 1993), hlm. 83

²⁰⁰ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan secara langsung kepada masyarakat baik fakir miskin dan anak-anak terlantar.

2. Wawancara²⁰¹

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.²⁰² Artinya wawancara dengan perencanaan, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk mewawancarai para pegawai di Dinas Sosial Provinsi Riau.

3. Dokumentasi²⁰³

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, buku tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), berupa foto-foto ketika peneliti mewawancarai pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau, data-data tentang jumlah anak terlantar dan fakir miskin di Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis berupa *hukum normatif* dan *content analysis*. Analisis *normatif*²⁰⁴ dapat digunakan karena

²⁰¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

²⁰² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 194.

²⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai *norma hukum* positif, sedangkan *kualitatif* yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris)²⁰⁵ dari dokumen.

Content analysis digunakan dalam penelitian ini karena salah satu objek kajian adalah Undang-Undang Dasar 1945. *Content analysis* atau kajian isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik memanfaatkan dokumen dan menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁰⁶

Kemudian dikemukakan para ahli. Diantaranya Weber mendefinisikan *content analysis*.²⁰⁷ *Content analysis* menyampaikan tiga syarat, yaitu: objektif, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Analisis harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, untuk kategori isi harus menggunakan kategori tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan generalisasi, artinya temuannya harus mempunyai sumbangan teoritis, temuan yang hanya deskriptif rendah nilainya.²⁰⁸

²⁰⁴ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

²⁰⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: 1997), hlm. 269.

²⁰⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Op. Cit.*, hlm. 163.

²⁰⁷ *Content analysis* sebagai metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Lihat Weber seperti dikutip oleh Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 220.

²⁰⁸ Sujono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 15.

Dengan metode ini, data kualitatif yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat, setelah itu dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Di Provinsi Riau Perspektif *Maqâshid Syari'ah*. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau. Permasalahan terhadap fakir miskin dan anak terlantar tidak lepas dari tingginya tingkat penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga ini menjadi fenomena yang sudah mulai kelihatan di Provinsi Riau. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan keluarga tempat mereka tinggal tampaknya belum banyak dilakukan, padahal keluarga merupakan pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama yang memungkinkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Dengan demikian, masih ada kebijakan dari pemerintah yang belum tepat sasaran untuk mengatasi anak terlantar ini. Seperti contohnya di Kecamatan Tampan tepatnya di pasar pagi arengka, masih ada ditemukan anak-anak yang putus sekolah, bekerja di pasar, berjualan di perempatan lampu lalu lintas dan meminta-minta di jalanan yang belum tertangani oleh pemerintah terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara di Provinsi Riau.

- a. Pendidikan yang Terlampau Rendah.
- b. Malas Bekerja.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Alam.
- d. Terbatasnya Lapangan Kerja.
- e. Keterbatasan Modal..
- f. Rendahnya Derajat Kesehatan.
- g. Beban Keluarga.
- h. Kondisi Terisolasi.
- i. Tidak adanya penyediaan rumah singgah.
- j. Tidak adanya yayasan pendidikan non formal bagi anak-anak terlantar.

3. Solusi menurut syari'at Islam Pasal 34 UUD 1945 di Provinsi Riau tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara perspektif *maqâshid syari'ah*. Terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Solusi menurut syariat Islam; terdiri dari:
 - 1) Bekerja. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah swt.
 - 2) Mencukupi keluarga yang lemah. Salah satu konsep syari'at Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan *berusaha*. Namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di balik itu, juga harus ada usaha untuk menolong orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja.

- 3) Pemberdayaan zakat, wakaf dan sedekah. Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya Allah swt telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin.

b. Solusi menurut perspektif *maqâshid syarî'ah*; terdiri dari:

- 1) *Hifzh al-din* (memelihara agama); Islam disyariatkan oleh Allah swt dalam surat al-Maun ayat 1-6 untuk memberi makan fakir miskin dan anak telantar, karena jika kita memberi makan kepada mereka kita tidak tergolong kepada orang yang mendustakan agama.
- 2) *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa); pada anak terlantar berdasarkan penjelasan hadist kebutuhan pangan (makanan), kebutuhan sandang (pakaian), kebutuhan papan (rumah) termasuk kepada *masalah dharuriyah*, jika tidak ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok maka anak tersebut bisa mati (meninggal dunia).
- 3) *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan); ulama sepakat bahwa nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami dan berkewajiban menafkahi keluarganya yakni anak dan istri. Anak tidak hanya membutuhkan nafkah lahir dan batin dari orangtuanya tetapi juga membutuhkan pemeliharaan yang utuh. Jika hal ini dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orangtua dengan baik, maka tidak ada yang namanya fakir miskin dan anak terlantar tersebut.

- 4) *Hifzh al-aql* (memelihara akal); fakir miskin maupun anak terlantar merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memberikan pendidikan kepada mereka, karena dengan pendidikan tersebut apabila digunakan atau diperhatikan dapat menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar sehingga mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar bagi anak.
- 5) *Hifzh al-maal* (memelihara harta); fakir miskin dan anak terlantar adalah Allah swt member rezeki kepada makhluk yang sangat banyak jumlahnya, diberinya bumi ini potensi untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk. Oleh karena itu, janganlah seseorang tidak mau berusaha, padahal dia tahu bahwa langit tidak menurunkan hujan, emas dan perak. Akan tetapi, langit dan bumi penuh dengan rezeki yang mencukupi bagi semua makhluknya.

B. Saran Dan Rekomendasi

1. Kepada Pemerintah Kementrian Sosial Republik Indonesia
 - a. Peningkatan anggaran untuk Dinas Sosial Provinsi Riau yang direkomendasikan dari negara untuk pemecahan masalah anak terlantar dalam panti asuhan atau di luar panti sebagai pemegang kekuasaan.
 - b. Pemerintah khususnya Dinas Sosial Provinsi Riau mempunyai perhatian yang lebih terhadap perlindungan fakir miskin dan anak terlantar. Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau aturan yang dibuat sejak dahulu sama dan selalu ada amandmen, namun masalah ini masih menjadi masalah yang besar bagi negara.

- c. Pemerintah melalui Dinas Sosial Provinsi Riau mencari akar masalah permasalahannya, dengan begitu fakir miskin dan anak terlantar bisa berkurang dan terselesaikan. Sehingga undang-undang yang ada dan dibuat pemerintah dapat dijalankan dengan baik.
- d. Peran serta pemerintah daerah, anggaran dan aparatur yang baik dan faham tentang masalah ini juga menjadi hal yang harus diutamakan, tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam perlindungan ini. Dengan begitu fakir miskin dan anak terlantar dapat benar-benar teratasi.

2. Bagi Masyarakat

- a. Bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan yang lebih dari pada saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, bisa memperhatikan juga keadaan saudara-saudaranya. Dengan ikut berperan untuk mengatasi masalah ini memberikan bantuan, baik materi maupun moral.
- b. Bagi masyarakat juga harus berhati-hati agar tidak masuk kedalam masalah penerantaran anak dan kemiskinan, dengan cara mempersiapkan diri dengan baik dari mulai keterampilan, pendidikan dan lain-lain. Dengan tujuan agar mampu bersaing dengan yang lain, sehingga SDM mampu dan tidak menjerumuskan kita kedalam masalah tersebut.
- c. Semua masyarakat itu sama dimata hukum (*equality before the law*) termasuk pemberian perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar oleh negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustakan Progressif, 1997.
- Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013.
- Alaluddin, *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam, pentj. Jamaluddin Miri*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Alimuddin, *Pendidikan Islam Solusi Problematika Modern*. Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007.
- Al-Hafizh Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Cet. I. Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Jilid. 30*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah a-Da'wah Syabab al-Azhar, tt), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Huraerah, *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: PT. Nuansa, 2006.

Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*. Beirut: Al-Risalah, 1997.

Abu Bakr Ahmad Al-Razi, *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqad fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Mustafa Muhammad Syalaby, t.th.

Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*. Beirut: Al-Risalah, 1997.

Abdullah Nashih Ulwan. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Cet. I. Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Al-Hafizh Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Cet. I. Jakarta: Darul Haq, 2014.

Ahmad Raysuni, *Nazhariyyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syathibi*. Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'iyah Li Al-Dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tawzi', 1995.

Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah wa Makarimuhu*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy, 1993.

Abd al-Rahman bin Abd al-Qasim, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, Juz. 19. Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd Li Thiba' at al-Mushaf al-Syarif, 2004.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Al-Shatibi, *Al-Muwaffaqad fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Mustafa Muhammad Syalaby, t.th.

Al-Ghozali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*. Beirut: Al-Risalah, 1997.

Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughah*, Juz. 4. Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1960.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bambang Sunggono. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakrta: Sinar Grafika, 1994.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Bambang Ismawan, *Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: BKKBN, 2003.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa*. Jakarta: Aku Bisa.
- Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cet. I. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Tahun 2007.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Jakarta: FISIP UI Press, 2005.
- Ibnu al-Qayim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in an-Rabb al-alamain*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Ibrahim bin Musa al-Khumiy al-Gharntiy al-Malikiy (as-Syathiby), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Terjemah: Bahrum Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru, 1990.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Cipta Karya, 2000.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam*, Cet. XX. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Khalil Bin Ahmad Al-Farahidiy, *Kitab al-Ain*, Juz. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: 1997.
- Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2. Cet-7. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lili Rasyidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Lukman Ali Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Cet. Ke 7. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2003.
- Musthafa Husni Assiba'I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*/ Bandung: CV Diponegoro, 1993.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Menodorong Perubahan*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Sa'ad bin Sa'id al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa alaqtuha bi al-Adillah al-Syari'ah*. Riyadh: Dar al-Hijrah Li al-Nasyr wa al-Tawzi, 1998.

Musfir Bin Ali Al-Qathaniy, *Manhaj Istimbath Al-Ahkam Al-Nawazil Al-Fikhiyah Al-Mu'ashirah*, (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadhr Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Musthafa Husni Assiba'I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Bandung: CV Diponegoro, 1993.

M.Yusuf. *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelolah Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, Salemba Empat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

M. Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mulia Astuti,dkk. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta : P3KS Press. 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 14*. Jakarta: Lintera Hati, 2002.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Vol. 1. Jakarta: Lintera hati, 2002.

Musthafa Ahmad Al-Zahrqa, *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT. Riora Cipta, 2000.

Moh. Rifa'i. *Fiqih Islam*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Mardawi, Ala al-Din Ali ibn Sulaiman, *al-Tahbir Syarh al-Tahrir*, Juz. VII. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. II. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohammad Taufik Makarao, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. II. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Majma al-Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004.

Muhammad bin Umar bin al-Husayn al-Raziy (al-Raziy), *al-Mahshul*, Juz. 6, .Riyad: Jami'ah al Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, 1400 H.

Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Basha'ir liintajy ilmy, 1988.

Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo, 2000.

Mohammad Taufik Makarao, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Muhammad bin Mukarram bin 'ali, *Lisanu al-'Arabi*, Vol. 5. Beirut: Dar Sadir, 1414 H.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2005.

MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Cet. I. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.

Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidy*. Qatar: Wizarat al-Awqaf wa Syuun al-Diniyah, 1998.

Nur al-Din bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilm al-Maqashid al-Syariah*. Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001.

Pipit Febrianti, *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI) Offline, versi 3.0.2.

Rosdalina, *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*, Jurnal Iqra' Volume 4 Juli - Desember 2007.

RM Kastria Bhumiu Persada, 2012. *Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalnan Sebgai Individu Dalam Ruang Publik (Studi Kasus Terhadap Tiga Anak Jalanan Laki-laki Binaan Rumah Singgah Dilts Faoundation)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi, Universitas Indonesia Depok, h.19 (Online), Diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.

Ruslan H. Prawito, *Penduduk, Teori, Fakta dan Masalah*. Bandung: Alumni, 2008.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Saifuddin Mujtaba *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2010.

Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid. 5. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Said Rusli, *Ilmu Kependudukan* Bogor: Pustaka LP3S, 2005.

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cet. I. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Napsiyah dan Lisna Diawati Fuaid, *Belajar Teori Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*, Cet. I. Jakarta Timur: Istanbul, 2016.

Sujono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Pengantar Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 1985.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.

Saifuddin Mujtaba *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2010.

Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Sajogyo dan Jiwati Sajogyo, *Sosioogi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1983.

Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.

Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Diponegoro, 2004.

Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Perundang-Undangan

Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017.

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*. Pekanbaru: Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Legality. 2017. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cet 1. Yogyakarta: Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. (Pemerintah Provinsi Riau Dinas Sosial Tahun 2017). hlm. II-29.

Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila. Surabaya: Apollo Lestari, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin.

Undang-Undang Perlindungan Anak, Cet. 1. Yogyakarta: Legality, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Cet. 1. Yogyakarta: Legality, 2017.

C. Tesis/Desertasi

Alfin Qodri Azazi. 2016. *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rina Pitrida. 2016. *Kewajiban Nafkah Dan Hadhanah Terhadap Anak Piatu Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156*, Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Nihlatus Shoimah. 2010. *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlingdungan Anak)*, Tesis. Malang: Universitas Islam Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Jurnal

Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijawa.

Irwan Sandi, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*. e-Jurnal Katalogis, Volume 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 5, Mei (2016), ISSN: 2302-2019. Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako.

Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*. Jurnal *Isti'dal* (Jurnal Studi Hukum Islam). Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. LP. Ma'arif NU Kabupaten Jepara.

Nuryanto, *Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jurnal *Tapis*. Vol. 14, No. 02, Juli-Desember (2014). Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Jurai Siwo Metro .

Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Jurnal Lex Administratum), Vol. I/ No. 2/ Januari-Maret/ 2013.

Yohanes Suhardin, *Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan) Tahun ke-40 No. 3 Juli-September 2010. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

E. Website

Anak", Wikipedia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.

[Http://dinsos.pekanbaru.go.id/index.php?view=article&catid=7:sasaran-prioritas](http://dinsos.pekanbaru.go.id/index.php?view=article&catid=7:sasaran-prioritas). Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, [www. Policy.hu/suharto/modula/makindo 40. htm](http://www.policy.hu/suharto/modula/makindo40.htm)/(Online), Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.



UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KARTU TANDA MAHASISWA



NIM : 31695104860
NAMA : BADRUDIN
PRODI : HUKUM KELUARGA (AH)
FAKULTAS : PASCA SARJANA
BERLAKU S.D : 01-09-2021



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

BADRUDHI

NIM

31695104860

PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

PROF. DR. KH. AKHMAD MUJAHID

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

DR. H. MAWARDI M. SALEH, MA

JUDUL TESIS/DISERTASI

IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD

DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN

BERBANGSA DI PROVINSI RIAU

← PERSPEKTIF MAQASHID SYARI

TENTANG KAFKAR DAN HAD

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syari



KONTROL KUALITAS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ditentang orang lain sebagai jawa seluruhnya tulis ini tanpa me...
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s...
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	11/10/2018	State Islamic University of Sultan Syarif		
2.	17/1/2018	BAB II		
3.	17/3/2018	BAB III		
4.	20/5/2018	BAB IV		
5.	11/7/2018	BAB V		
6.	15/9/2018	ABSTRAK DAN ACC KESELURUHANN		

Catatan
*Coref yang tidak perlu

Pekanbaru, 15 Juli 2018

Pembimbing I / Co Promotor

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	20/8/2018			
2.	13/10/2018	Pertemuan Bab II		
3.	1/9/2018	Pertemuan Bab II		
4.	18/10/2018	Pertemuan Bab IV		
5.	11/12/2018	Pertemuan Bab IV DAN ANALISIS DIBEKASIN SERIK BAB V		
6.	22/12/2018	ACC Revisi		

Catatan
*Coref yang tidak perlu

Pekanbaru, 26 Desember 2018

Pembimbing I / Co Promotor

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	: hadrudin
ID Number	: 31693104860
Date of Birth	: October 18, 1986
Sex	: Male
Test Form	: Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test	
Listening Comprehension	: 46
Structure & Written Expressions	: 54
Reading Comprehension	: 50
Overall Score	: 500

Expire Date : October 15, 2019

English Proficiency Test & Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. K.H. Alimud Din No. 54 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 Telp. 0853 3144 6833 Fax. 0756 1 838832
 Email : info@pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id Website : pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id



The Head of Language Development Center
 Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed-TESOL
 NIP. 196510281997031001





© Halkidika

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Jln Suska Riau

CONTEMPORARY

DIBERIKAN KEPADA

Taneel Lahiri - 18 Oktober 1986

500 الصفحة

The Center for Longevity Professionals
CLP
 One Market Square • Suite 100 • San Francisco, CA 94104
 Tel: 415.774.1111 • Fax: 415.774.1112 • Email: info@clp.org

*Arabic Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Qasri/Kampar Renc.
The scores and information presented in this score report are approved.*

Address : J. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 LP 0852 7144 0823
Email : info@ucm-bekas.com Website : pusuat-bekas.com

Drs. H. Kalyo Hasibuan, M. Ed-TESOL
The Head of Language Development Center



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28125 PO BOX 1004
Phone & Fax, (0781) 858832, 8181 hap@uin-suska.ac.id E-mail : ppa_uinsuskariau@gmail.com

Pekanbaru, 13 Desember 2017

1.n.04-PPs/PP.01.9/ 2742 / 2017

1 (dua) berkas

Pemohonan Rimbungan Disertasi
a.n. *Badrudin*

Kepada Yth.
Saudara:

1. Prof. Dr. Achmad Mujahidin, M. Ag
2. Dr. Mawardi M. Saleh, MA

Dosen PPs UIN Suska Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Saudara:

Nama : Badrudin
NIM : 31693104860
Program : Dokine (S.I)
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syar'iyah)

Telah menyusun Proposal Disertasi dalam rangka menyelesaikan studi pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan itu kami menghormati kesediaan Saudara untuk merimbunga yang bersangkutan dalam menyusun Disertasi dengan judul:

Nafkah Dan Hadhanah Terhadap Anak Yatim Piatu Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Rekonstruksi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)

Pertama kami sampaikan bahwa dalam proses bimbingan saudara dapat menyampaikan saran dan perbaikan terhadap Disertasi yang bersangkutan. Kami Mohon agar bimbingan dapat dilaksanakan selambit-lambatnya (secepat) mungkin. Berikut kami lampirkan Proposal Disertasi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan bimbingan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb
Direktur

Prof. Dr. Dyas Husni, M. Ag
NIP. 19611130 198903 1 002

1. Dosen Pembimbing
2. Mahasiswa pbr
3. Asist

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Nama : BADRUDIN
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Kijang, 18 Oktober 1986
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat Rumah : Jl. Imam Bonjol Parit. 2 RT. 003/ RW. 018. Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
 No Telp/ Hp : 0853 7771 7512
 Nama Orang Tua : H. Ridwan (Ayah)
 Hj. Maspiati (Ibu)
 H. Naim (Mertua)
 Hj. Aminah (Mertua)
 Nama Istri : Ns. Sri Haryuni, S. Kep
 Nama Anak : Badriyah Ayuni Zahra

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. MI. Nurul Hidayah Parit Lapis Daud Pulau Kijang | : Lulus Tahun 1999 |
| 2. MTs. Nurul Hidayah Parit Lapis Daud Pulau Kijang | : Lulus Tahun 2002 |
| 3. MA. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur | : Lulus Tahun 2005 |
| 4. S1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | : Lulus Tahun 2009 |
| 5. S2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | : Lulus Tahun 2013 |
| 6. S3. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | : Lulus Tahun 2019 |

RIWAYAT PEKERJAAN :

No	Nama Instansi/ Perusahaan	Jabatan	Tahun
1	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal Jambi	Dosen Tetap	2014 - Sekarang
2	Institut Agama Islam (IAIN) Sultan Thaha Saifudin Jambi	Dosen Luar Biasa (DLB)	2014 - 2016
3	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Mujtahadah Pekanbaru	Dosen Luar Biasa (DLB)	2016 - Sekarang
4	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Kifayah Pekanbaru	Dosen Luar Biasa (DLB)	2016 - Sekarang
5	Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau	Dosen Luar Biasa (DLB)	2018 - Sekarang



PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Osis Madrasah Aliyah : Tahun 2002 - 2005
2. IPNU Cabang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Tahun 2005 - 2009
3. PMII Rayon Al-Faruq Syari'ah UIN Mualana Malik Ibrahim Malang : Tahun 2005 - 2009
4. IKPMR (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau) Di Kota Malang : Tahun 2005 - 2009
5. DA'I KANTIBMAS POLDA Provinsi RIAU : Tahun 2017 -
Sekarang
6. Persatuan Guru Nahdatul Ulama (PERGUNU) Provinsi Riau : Tahun 2018 -
Sekarang
7. Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Kab Indragiri Hilir Provinsi Riau : Tahun 2019 -
Sekarang

KARYA ILMIAH :

No	Tema	Keterangan	Tahun
1	Upaya Keluarga Pra Sejahtera Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).	Penulis (Hasil Penelitian)	2008
2	Cerai Gugat Dalam Perkawinan Paksa (Studi Perkara No. 0827/ Pdt. G/ 2008/ PA. Blitar).	Penulis (Skripsi)	2009
3	Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat <i>Judex Factie</i> Pengadilan Agama Kota Malang).	Penulis (Tesis)	2013
4	Upaya Keluarga Pra Sejahtera Dalam Membentuk Keluarga Sakinah	Penulis (Istinbath Jurnal Hukum)	Vol. 14 No. 1 (2017)
5	Strategi Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Kelurga	Penulis (Jurnal Al-Liqo, Pendidikan Islam).	ISSN : 2461-033X Volume. 01 Nomor. 02 Juli-Desember 2016
6	Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan	Penulis (Jurnal Al-Qadha, Hukum Islam Dan Perundang-Undangan)	Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2016
7	Sanksi Pelaku Poligami Di Indonesia Perspektif Fiqh	Penulis (Jurnal Hukum Islam)	Vol. XVII No. 1 Juni 2017 P-ISSN : 1411 - 8041 e-ISSN : 2443 - 0609

Pekanbaru, 18 Desember 2019

Dr. BADRUDIN, S.HI., M.HI.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.